

EDISI 24 / APRIL 2020

Masyarakat

ASEAN

INDONESIA UNTUK DUNIA



04

PEREMPUAN
DAN
PERDAMAIAN

18

PERSAHABATAN
PAPUA DAN
YAMAGATA

59

MENIKMATI
KAWASAN
SAIGON



04



06



39



18



59

PENANGGUNG JAWAB
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN

REDAKTUR
Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

PENYUNTING/EDITOR
Rahmat Azhari
Avi Dewani Sari Harahap
Thalita Evani Hindarto

**DESAIN GRAFIS/
FOTOGRAFER**
Aswandi
Syarifah Nadya Mahdini

SEKRETARIAT
Mulyanto
Heriyadi Setiawan
Iman Heri Patwono
Sasi Harianti
Khusnul Khatimah
Yangyang

PEMBUAT ARTIKEL
Janita Jaya
Rizky Anugerah Putra
Annisya Khairati
Ahmad Fahriza
Anggraeni Widiastuti
Nanda Tri A. Harahap
Adfikri Kevin Marvel
Salma Putri Rianti
Ika Permata Sari
Sabrina
Yusuf Firmansyah
Primadiana Sari

ALAMAT REDAKSI
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri
Jl. Taman Pejambon No.6,
Jakarta Pusat
Telp. 021 - 3509050 / 3509059
Fax. 021 - 3509050

DAFTAR ISI

PERSPEKTIF

Perempuan dan Perdamaian | 04

LAPORAN UTAMA

Pertemuan Perdana Para Menteri Luar Negeri ASEAN 2020 | 06

Diplomasi Kemanusiaan untuk Myanmar | 09

LAPORAN KHUSUS

Melembagakan Para Perempuan Pelaku Perdamaian | 12

Perempuan ASEAN Bicara Perdamaian | 15

Persahabatan Papua dan Yamagata | 18

OPINI

Victorious Indonesia at World International Debating Championship | 23

Fintech: The Future of Finance in Southeast Asia | 28

WAWANCARA

Duta Besar RI di Hanoi: Keketuaan Vietnam di ASEAN 2020 | 34

REPORTASE

Aplikasi Keanggotaan Timor Leste di ASEAN | 39

Diplomacy for Peace and Prosperity | 41

POJOK PSA

Urgensi Perbaikan Sistem Keamanan Maritim di Indonesia | 43

POJOK BAHASA

Bahasa Vietnam | 46

SERBA SERBI

Ao Dai, Busana Vietnam yang Anggun | 48

Pesona Pariwisata Brunei | 53

Menikmati Kawasan Saigon | 58

GALERI FOTO | 61

INFOGRAFIS | 63

PEREMPUAN DAN PERDAMAIAN

Faizal Chery Sidharta, Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN

Peran perempuan dalam penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia semakin krusial dan tidak dapat dikesampingkan. Dalam Pernyataan Pers Tahunan tahun ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan prioritas Indonesia dalam dua hal: (1) investasi dalam perdamaian, mengingat Indonesia kini merupakan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB; dan (2) investasi dalam perempuan, atau dalam pengertian lain berarti mendorong peran aktif wanita dalam pemeliharaan keamanan. Mengutip langsung perkataan beliau: *“investing in women also means investing in peace”*. Indonesia selama dua tahun terakhir telah

banyak mengangkat isu penguatan peran perempuan, serta menyelenggarakan kegiatan bertema perempuan dalam pembangunan perdamaian.

PEREMPUAN DI ASEAN DAN FORUM INTERNASIONAL

Di tingkat ASEAN sendiri, pada 2019 telah diadakan ASEAN Women Interfaith Dialogue. Tujuan kegiatan ini adalah agar peran perempuan sebagai aktor utama penciptaan toleransi dapat semakin diangkat demi menunjang pembangunan. Kemudian, melalui ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), juga telah berhasil dibentuk ASEAN Women Peace Registry (AWPR). Ini merupakan langkah nyata Indonesia memformalisasikan kontribusi para mediator, khususnya kaum perempuan, ke dalam sebuah wadah komunikasi dan kerja sama.

Adalah sebuah ironi ketika perempuan acap kali dianggap hanya sebagai korban ketika konflik berkecamuk. Padahal, dan ini seringkali luput disadari, perempuan juga berperan dalam pembangunan dan pemeliharaan perdamaian itu sendiri. Oleh karena itu, peran perempuan perlu terus diangkat agar publik mengetahui capaian perempuan dalam menciptakan perdamaian yang sebenarnya.

Demi mendukung prioritas ini, Indonesia senantiasa menggaungkan isu perempuan di setiap forum. Dalam kerangka pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP), pada masa presidensinya di DK PBB pada 2019, Indonesia telah mengkhususkan pembahasan mengenai pemberdayaan Perempuan Pemelihara Perdamaian (*female peacekeepers*). Indonesia secara konkret juga telah mengirim personel perempuan dalam Kontingen Garuda untuk MPP PBB. Inisiatif ini didasari pemahaman bahwa empati mampu memberikan pendekatan yang unik dan tidak intimidatif terhadap korban di daerah konflik, khususnya ibu dan anak-anak.

Anggapan bahwa perempuan tidak memiliki dampak signifikan dalam upaya perdamaian perlu tegas dibantah. Sebuah studi oleh Jean Krause pada tahun 2018 yang diberi judul *Women's Participation in Peace Negotiations and the Durability of Peace*, menemukan fakta bahwa perjanjian damai (antar negara) yang ditandatangani oleh para perempuan terbukti mampu bertahan lebih lama daripada yang ditandatangani oleh laki-laki. Penelitian ini menyelidiki 82 perjanjian dari 42 konflik bersenjata pada periode 1989 hingga 2011. Meski tidak selalu berlangsung demikian, hal ini tetaplah menjadi sebuah temuan fakta yang tak bisa dipungkiri mengenai keunggulan perempuan dalam pembangunan perdamaian.

PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN

Pengarusutamaan peran perempuan yang selama ini digalakkan juga sejalan dengan Resolusi DK PBB nomor 1325 tentang *Women, Peace and Security* (WPS), yang menekankan pentingnya perspektif



Sumber foto: Shutterstock

gender dalam implementasi kesepakatan demi terciptanya perdamaian. Menduniyanya agenda WPS, yang juga turut disumbang oleh Indonesia, akan dapat menghasilkan banyak hal positif. Misalnya saja semakin terjaminnya hak-hak perempuan, khususnya di zona konflik, perlindungan atas status hukum perempuan, makin dikenalnya prestasi perempuan dalam menciptakan perdamaian, hingga tentunya tercapainya tujuan damai regional maupun internasional.

Meski demikian, agenda WPS masih jauh usai, dan masih perlu terus diperjuangkan. Dalam semangat ini, Indonesia berkomitmen untuk terus mengangkat isu ini dalam setiap kesempatan. Di level ASEAN, melalui AIPR, Indonesia mendukung AWPR, dengan melibatkannya dalam diskusi-diskusi perdamaian maupun menyampaikan aspirasi para mediator perempuan yang dapat berguna bagi penciptaan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dalam kaitan ini, Indonesia juga senantiasa mendorong agar AWPR dapat bekerja sama dengan berbagai jaringan serupa seperti

Global Alliance of Regional Women Mediator Networks.

Perluasan lingkup pembahasan WPS juga dilakukan melalui forum internasional sebesar *ASEAN Regional Forum (ARF)*, yang beranggota 26 negara plus Uni Eropa. Pada 2019, ARF telah berhasil menyepakati *Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security at the ARF*, yang dimotori oleh Kanada, Indonesia, Thailand, Uni Eropa, dan Republik Korea. *Mainstreaming* (Pengarusutamaan) isu WPS melalui kolaborasi regional dan global diyakini akan dapat semakin menyelaraskan, serta menggemakan tujuan mulia bersama, yaitu terciptanya perdamaian, khususnya melalui tangan-tangan perempuan.

PEREMPUAN DAN PERDAMAIAN: PRINSIP INDONESIA

Di Indonesia, pahlawan nasional seperti R.A. Kartini dengan buku *“Habis Gelap Terbitlah Terang”*, Dewi Sartika yang mendirikan Sekolah Kautamaan Istri, Christina Martha Tiahahu yang memperjuangkan kemerdekaan, Fatmawati Soekarno sang Ibu Negara per-

tama, H.R. Rasuna Said yang memelopori jurnisme perempuan, dan banyak nama terhormat lainnya, menjadi bukti bahwa perempuan selalu memiliki tempat khusus dalam sejarah perjuangan bangsa. Jelas terlihat bahwa perempuan dan upaya penciptaan perdamaian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Ini senada dengan kata mutiara dari Cut Nyak Dhien: *Dalam menghadapi musuh, tak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang*. Empati yang justru dapat melunakkan sengketa adalah anugerah yang perlu dihayati dan disebarluaskan nilainya.

Akhir kata, Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat keterlibatan perempuan yang tinggi dalam proses perdamaian maupun konflik, akan terus memperjuangkan tujuan agung tersebut, baik di tingkat global, internasional, maupun regional, termasuk tentunya di ASEAN. Ini demi mendukung tercapainya kesetaraan gender, serta berkontribusi demi terciptanya perdamaian yang abadi. ■



Sumber foto: Dok. Pribadi



Sumber foto: Kementerian Luar Negeri RI

PERTEMUAN PERDANA PARA MENTERI LUAR NEGERI ASEAN DI TAHUN 2020

Rizky Anugerah Putera, Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN

Tinjauan ini perlu dilaksanakan demi meningkatkan kinerja AICHR dalam mandat perlindungan HAM di ASEAN.

Pada 16-17 Januari 2020, telah dilaksanakan pertemuan ASEAN Foreign Ministers' (AMM) Retreat di kota Nha Trang, Vietnam. Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN ini rutin diadakan setiap awal tahun, dengan tujuan mengoordinasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama, serta menjadi kesempatan bagi Ketua ASEAN yang baru memaparkan isu-isu yang menjadi prioritas dalam keketuaan negaranya di tahun berjalan. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah menghadiri pertemuan penting ini didampingi oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares.

MENYAMBUT KEKETUAAN VIETNAM 2020

Pada pertemuan ini, para menteri luar negeri ASEAN menyampaikan dukungan atas visi keketuaan Vietnam yang bertema "Cohesive and Responsive". Kohesif dalam

konteks ini berarti keketuaan Vietnam diarahkan untuk mengkonsolidasikan soliditas dan sentralitas ASEAN, serta memperkuat integrasi ekonomi dan identitas ASEAN. Sementara itu, responsif artinya Vietnam akan mendorong agar ASEAN dapat semakin proaktif dan inovatif dalam merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di kawasan secara cepat dan tepat. Para menteri luar negeri ASEAN menyadari, untuk merealisasikan visi keketuaan Vietnam tersebut, ASEAN perlu menumbuhkan karakter organisasi yang padu dan bergerak sebagai satu kesatuan.

Untuk itu, Vietnam menyampaikan inisiatifnya untuk pertama-tama memperkuat percepatan penyelesaian proses internal ASEAN, seperti Mid-Term Review of ASEAN Community Blueprint 2025 dan ASEAN Community Post-2025 Vision. Evaluasi dokumen Cetak Biru Masyarakat 2025 akan mampu memberikan gambaran sejauh mana ASEAN telah berkembang sebagai satu masyarakat dan langkah apa yang dapat diambil untuk memperkuat upaya ASEAN Community Building. Selanjutnya, Vietnam berpandangan bahwa periode keketuaannya merupakan momentum yang tepat untuk memulai pembahasan mengenai Visi ASEAN Pasca 2025. Vietnam juga mengusulkan ASEAN Community Images and Visibility, yaitu upaya untuk semakin memasyarakatkan berbagai identitas

ASEAN yang sudah ada di pemerintahan dan di masyarakatnya. Cara-caranya antara lain dengan pengibaran bendera ASEAN di kantor-kantor pemerintahan, menyanyikan ASEAN Anthem di pertemuan-pertemuan resmi, menampilkan logo ASEAN di dokumen perjalanan, serta menyediakan ASEAN Lane di pos-pos pemeriksaan imigrasi.

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DI ASEAN PADA 2020

Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, pendapat Indonesia tentunya sangat diapresiasi oleh Negara-negara Anggota ASEAN lainnya. Hal ini yang membuat berbagai gagasan Indonesia dapat diterima dengan baik di ASEAN dan semakin memperkuat kerja sama di ASEAN. Pada pertemuan ini, Menteri Retno Marsudi menyampaikan pentingnya pengarusutamaan agenda Women, Peace and Security (WPS) di berbagai agenda pertemuan ASEAN mengingat pentingnya peran perempuan dalam upaya pembangunan dan pemeliharaan perdamaian di tingkat kawasan dan global. Beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi penggerak utama isu ini melalui prakarsa penyelenggaraan beberapa kegiatan guna mendukung penguatan upaya *mainstreaming* agenda WPS di kawasan. Pada 2019, misalnya, Indonesia menyelenggarakan Regional Training on Women, Peace and Security dan ASEAN Women Interfaith Dialogue.



Sumber foto: Kementerian Luar Negeri RI



Sumber foto: Kementerian Luar Negeri RI

Tahun ini, Indonesia berkomitmen mengupayakan terbentuknya jejaring mediator dan fasilitator perempuan di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Retno juga menggarisbawahi pentingnya keketuaan Vietnam untuk menyelesaikan beberapa masalah yang tertunda, seperti dimulainya proses Review Terms of Reference (TOR) ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR) yang telah tertunda bertahun-tahun. Tinjauan ini perlu dilaksanakan demi meningkatkan kinerja AICHR dalam mandat perlindungan HAM di ASEAN. Indonesia juga mengangkat pentingnya penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tahun 2020 yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat ASEAN. Dari sisi sosial-budaya, Indonesia mendorong agar identitas, kesadaran, dan kebanggaan ASEAN dapat semakin dijunjung tinggi. Aspirasi ini berusaha dicapai melalui penyusunan "Narrative of ASEAN Identity" yang diharapkan dapat semakin mengokohkan identitas ASEAN di masyarakatnya.

PERKEMBANGAN MASALAH KAWASAN: LAUT CINA SELATAN DAN RAKHINE STATE

Selain membahas isu internal ASEAN, para menteri luar negeri ASEAN juga menyoroti beberapa isu penting kawasan dan global. Satu isu yang diangkat adalah perkembangan pembahasan Code of Conduct in the South China Sea (COC).

Menteri Retno menekankan finalisasi COC dapat menjadi bukti kontribusi nyata ASEAN sebagai 'mesin perdamaian dan stabilitas' di kawasan. Dalam kaitan ini, menteri Retno menekankan pentingnya seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan COC dapat menghormati hukum internasional yang relevan, utamanya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Isu lain yang menjadi perhatian para menteri luar negeri ASEAN adalah perkembangan di Rakhine State.

Menteri luar negeri Myanmar menyampaikan *briefing* terkait upaya repatriasi pengungsi Rohingya yang menurut Myanmar

masih terhambat faktor keamanan. Menteri luar negeri ASEAN pada umumnya merasa prihatin atas kondisi di Rakhine State yang menjadi alasan mengapa para pengungsi di Cox's Bazaar, Bangladesh, masih enggan kembali ke daerah asalnya. Indonesia selaku pihak yang senantiasa mengedepankan isu kemanusiaan di Rakhine menekankan perlunya ASEAN berperan nyata dalam repatriasi pengungsi yang aman, sukarela dan bermartabat.

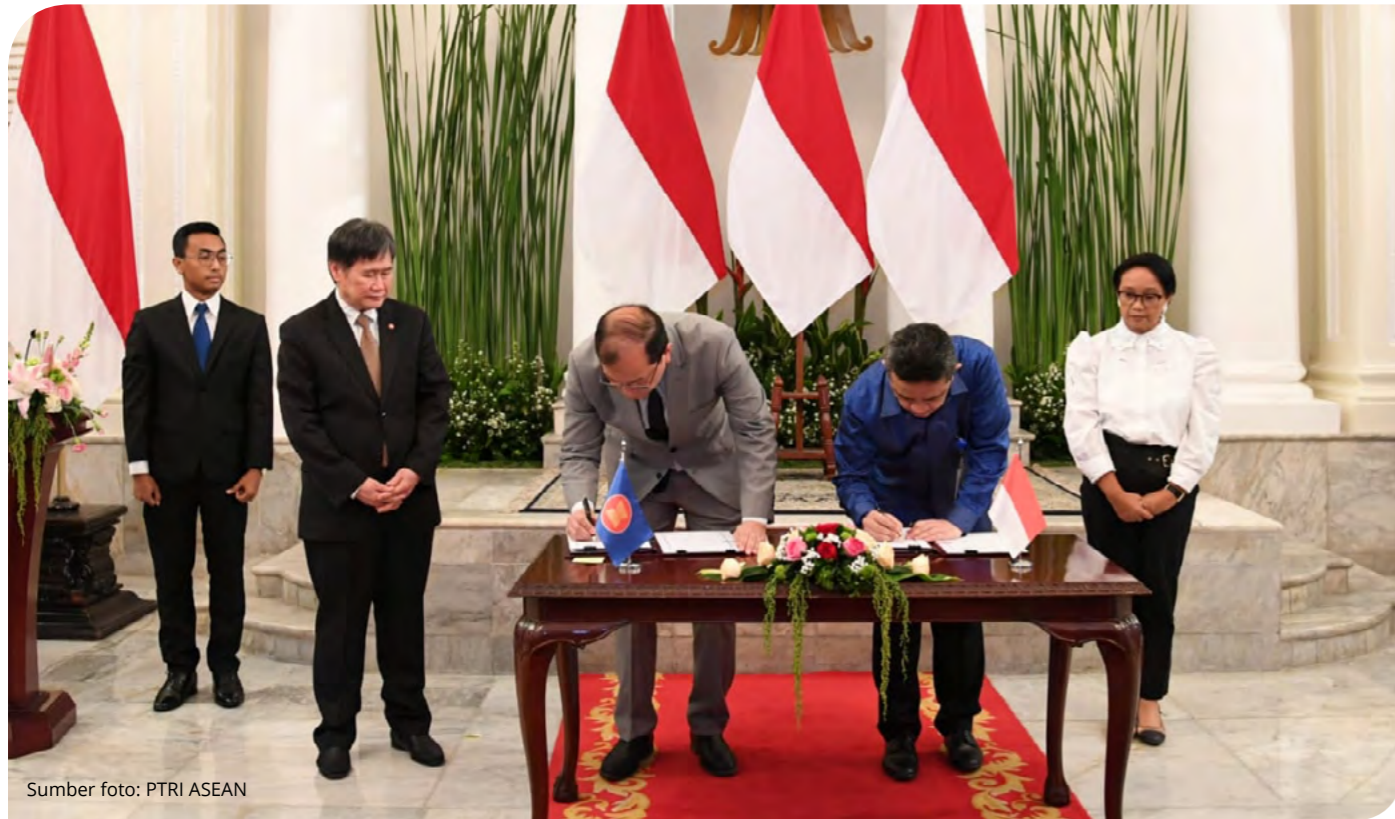
Indonesia telah memberikan sumbangsih nyata kepada Myanmar terkait Rakhine State, yaitu dengan memberi bantuan berupa hibah yang setara dengan US\$ 500 ribu serta membangun sebuah rumah sakit di Mrauk U. Inisiatif konkret Indonesia dalam membantu masalah kemanusiaan di Rakhine State ini mendapatkan apresiasi luas baik dari Pemerintah Myanmar maupun dari masyarakat internasional. ■



DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA UNTUK MYANMAR

Nanda Tri Andari Harahap, Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN

Sumber foto: PTRI ASEAN



Sumber foto: PTRI ASEAN

“Time is not on our side”, kata Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dalam sambutannya pada acara penandatanganan perjanjian pemberian bantuan hibah kepada Myanmar melalui Sekretariat ASEAN (ASEC) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, 20 Desember 2019.

Pernyataan tersebut sangat bebalasan mengingat masalah pengungsi Rakhine State telah berlangsung cukup lama dan proses menuju penyelesaian masalah tersebut juga memakan waktu yang tidak sedikit.

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang memberikan bantuan dalam implementasi Preliminary Needs Assessment (PNA), sebuah usaha bersama negara anggota ASEAN untuk repatriasi para pengungsi Rakhine State dari Cox's Bazar, Bangladesh, secara sukarela, aman, dan bermartabat. Melalui perjanjian

tersebut, ASEAN membuktikan peran dan kontribusi pentingnya dalam penyelesaian isu kemanusiaan di Rakhine State.

Penandatanganan Perjanjian

Hibah senilai Rp 7,5 miliar diserahkan secara simbolis melalui penandatanganan perjanjian oleh Pemerintah RI yang diwakili Luky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, dan ASEC yang diwakili Duta Besar Robert Matheus Michael Tene, Deputy Secretary General of ASEAN for Community and Corporate Affairs.

Penandatanganan perjanjian disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI dan Sekjen ASEAN. Turut hadir pada saat penandatanganan para Wakil Tetap Negara Anggota ASEAN (Permanent Representatives) di Jakarta, Direktur Eksekutif ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), serta pejabat Eselon I dan II baik dari Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI.

Wakil Tetap Myanmar untuk ASEAN, Duta Besar Min Lwin menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang sangat besar dari pemerintah Indonesia untuk Myanmar dalam proses repatriasi pen-

gungsi Myanmar. Dalam kesempatan yang sama, Sekjen ASEAN juga menyampaikan bahwa Ad-Hoc Support Team akan membantu ASEC mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan PNA.

Mekanisme Bantuan dan Implementasinya

Dalam perjanjian disebutkan bahwa hibah tersebut akan diterima oleh ASEC dan disalurkan melalui Ad-Hoc Support Team yang akan mengimplementasikan kesepakatan – kesepakatan PNA untuk mewujudkan repatriasi para pengungsi Myanmar.

Atas inisiatif Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Singapura pada November 2018, pemimpin ASEAN sepakat melibatkan AHA Centre dan ASEC dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat.

AHA Centre merupakan organisasi antarpemerintah yang bertujuan memfasilitasi kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi internasional lainnya dalam hal penanganan bencana di ASEAN.



Sumber foto: PTRI ASEAN



Sumber foto: PTRI ASEAN



Sumber foto: PTRI ASEAN

ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT) yang personalnya terdiri dari negara-negara anggota ASEAN, ASEC, dan AHA Centre, telah mengunjungi Myanmar dan melakukan assessment pada 4–13 Mei 2019.

Hasil dari assessment tersebut (Preliminary Needs Assessment) menghasilkan beberapa rekomendasi area kerja sama dalam proses repatriasi, yang akan diimplementasikan oleh Ad-Hoc Support Team. Secara struktural, tim ini berada di bawah koordinasi ASEC sehingga bantuan hibah Indonesia diserahkan kepada ASEC.

Diplomasi Kemanusiaan Indonesia

Pada KTT ASEAN ke-35 yang berlangsung 2 November 2019, Presiden Joko Wido-

do menyampaikan komitmen Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan, membantu proses repatriasi pengungsi Myanmar. Salah satu arahan Presiden adalah berkontribusi dalam melancarkan tugas Ad Hoc Task Force (selanjutnya disebut Ad Hoc Support Team) dalam proses repatriasi pengungsi Myanmar, yang diwujudkan dalam pemberian hibah ini.

Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U, Rakhine State, telah selesai dibangun pada Maret 2019. Penyerahan secara teknis (technical handover) juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diwakili Duta Besar RI untuk Myanmar, Iza Fadri, kepada Wakil Direktur Jenderal Departemen Pelayanan Kesehatan Myanmar, Thida Hla, sebagai wakil pemerintah My-

anmar, pada 10 Desember 2019 di Kantor Kementerian Kesehatan dan Olahraga Myanmar.

Pembangunan rumah sakit tersebut merupakan proyek bersama pemerintah dan masyarakat Indonesia yang dananya bersumber dari komunitas muslim Indonesia, komunitas Buddha Indonesia, dan donator lainnya. Pemerintah Indonesia berharap rumah sakit ini dapat beroperasi penuh pada awal tahun 2020.

Ini bukan bantuan pertama dari pemerintah Indonesia kepada Myanmar. Indonesia juga telah menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada Rakhine State pada 2017 yang dikawal langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, yaitu berupa 10 kontainer makanan dan pakaian serta pembangunan dua sekolah di Sittwe, Rakhine State, yang biayanya diperoleh dari donasi masyarakat Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Luar Negeri RI.

Penandatanganan perjanjian hibah di akhir 2019 merupakan bagian dari penguatan diplomasi kemanusiaan Indonesia selanjutnya. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI, Indonesia akan menguatkan peran dan kontribusinya pada penyelesaian isu kemanusiaan di Rakhine State. Komitmen Indonesia ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk terus meningkatkan peran sentral ASEAN dalam menyelesaikan isu tersebut. ■



Sumber foto: Dok. Pribadi

MELEMBAGAKAN PARA PEREMPUAN PELAKU PERDAMAIAN

Rizky Anugerah Putera, Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN

ASEAN kini telah memiliki kelompok perempuan yang memperjuangkan perdamaian: ASEAN Women for Peace Registry (AWPR). Pada 22 Agustus 2019, organisasi yang kelahirannya dibidani ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) ini melangsungkan pertemuan perdananya di Phnom Penh, Kamboja. Acara tersebut sekaligus menandai resmi beroperasinya institusi tersebut.

Direktur Eksekutif AIPR, Duta Besar Rezlan Izhar Jenie, membuka pertemuan perdana

tersebut dan menyambut seluruh anggota AWPR, yang juga disebut dengan "Registri (Registry)". Orang-orang yang duduk di AWPR adalah wakil dari negara-negara anggota ASEAN, di mana masing-masing negara diwakili maksimal tiga orang.

Sebenarnya inisiatif AWPR muncul pada Desember 2018. Namun pertemuan resmi antar anggota baru dilaksanakan Agustus 2019. Sebagaimana umumnya pertemuan perdana sebuah organisasi, pertemuan perdana AWPR membahas hal-hal fundamental guna menunjang operasional institusi di masa depan, antara lain kerangka

acuan (*Terms of Reference-TOR*), rencana aktivitas, hingga hubungan kemitraan dengan pihak lain.

Mengingat AWPR merupakan institusi yang lahir dari tangan AIPR, maka kerangka acuan AWPR pun tentunya tak jauh berbeda, dan juga menunjang pergerakan AIPR dalam mengupayakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui dialog dan kajian.

LANDASAN OPERASIONAL (USUL, GANTI: MEMBANTU UPAYA PERDAMAIAN)

Sebelum berdiri AWPR, AIPR telah beberapa kali mengadakan kegiatan bertema perempuan dan kontribusinya pada perdamaian, di antaranya "ASEAN Workshop on Strengthening Women's Participation in Peace Processes and Conflict Resolution" di Cebu City, Filipina pada 18-19 Maret 2015 dan "AIPR Symposium on the Plight of Women and Children in Conflict Situation" di Tagaytay, Filipina pada 8-8 Desember 2015. Kedua kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran dan melatih perempuan menjadi "agen" yang mempromosikan budaya damai. Filipina bisa dikatakan sebagai inisiator isu perempuan dan perdamaian di forum AIPR. AWPR sendiri merupakan inisiatif dari Filipina, tepatnya melalui wakilnya pada Dewan Pelaksana (*Governing Council*) AIPR.

Dalam Kerangka Acuan, tercantum tujuan pembentukan AWPR adalah menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan keahlian para perempuan yang telah berpengalaman dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi. Tujuan lain pendirian AWPR adalah menjadi institusi yang mengimplementasikan "Joint Statement on Promoting

Women, Peace and Security in ASEAN", deklarasi pernyataan bersama yang diadopsi para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-31 ASEAN pada 13 November 2017. Mandat utama dari pernyataan bersama tersebut adalah mendorong integrasi gender dan perspektifnya dalam seluruh inisiatif dan strategi pencegahan konflik dalam mekanisme ASEAN.

Kerangka Acuan juga mencantumkan tugas yang diemban para anggota AWPR, utamanya adalah untuk membantu upaya perdamaian dan rekonsiliasi di negara anggota ASEAN, sesuai permintaan dan berdasar konsensus ASEAN. Anggota AWPR juga dapat bertindak sebagai *resource persons* di kegiatan AIPR.

Sebagai lembaga yang dilahirkan AIPR, disebutkan dalam Kerangka Acuan AWPR, lembaga ini merupakan direktori atau sub-organisasi yang berada di bawah AIPR. Pengelolaan, administrasi, dan juga pemutakhiran data registri seluruhnya ditangani Sekretariat AIPR.

AGENDA PERTEMUAN PERDANA

Dalam Pertemuan Perdana AWPR, para anggota membahas pentingnya keselarasan kinerja antara AIPR dan AWPR agar tepat

guna dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Penting bagi kedua institusi yang saling berkaitan erat ini untuk bekerja sama dan berkoordinasi demi tercapainya target yaitu meningkatnya peran perempuan dalam upaya perdamaian di kawasan. Oleh karena itu, guna mengimbangi AIPR yang telah beroperasi sejak lama, ke depannya AWPR berinisiatif untuk melakukan beberapa aktivitas.

Seperti permasalahan mendasar di setiap organisasi yang baru terbentuk, kendala utama yang dialami AWPR pada saat per-

Pemahaman masing-masing Anggota AWPR atas isu Women, Peace and Security (WPS) juga perlu diharmonisasikan,

temuan perdana adalah kurangnya informasi yang diketahui oleh setiap anggota AWPR atas anggota lainnya, atau istilah umumnya "belum kenal". Oleh karena itu, setiap Anggota AWPR pun diminta untuk mempresentasikan latar belakang, area keahlian, dan proyek yang sedang dikerjakan, sehingga dapat mengenal kelebihan satu sama lain dan pada akhirnya dapat bekerjasama.

Pemahaman masing-masing Anggota AWPR atas isu *Women, Peace and Security (WPS)* juga perlu diharmonisasikan, mengingat hal ini jugalah yang menjadi mandat pembentukan AWPR. Harmonisasi ini diperlukan mengingat setiap anggota datang dari negara yang memiliki sistem dan pengertian yang berbeda-beda, juga latar belakang anggota yang berbeda. Penyelarasan pemahaman mengenai WPS di antara seluruh anggota AWPR tentunya akan memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan bekerjasama ke depannya.

Meskipun isu Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*Women, Peace and Security/WPS*) telah disepakati menjadi prioritas bersama di ASEAN, namun tidak dapat dipun-



Sumber foto: Shutterstock

gkiri bahwa perbedaan masih tetap ada dan menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi visi tersebut. Agenda lain yang juga dibahas di pertemuan perdana AWPR adalah masalah penambahan jumlah anggota. Sebagian anggota berpandangan bahwa peningkatan jumlah anggota AWPR juga berarti naiknya lingkup kepakaran.

KOMPOSISI ANGGOTA

Penentuan komposisi anggota telah diatur dalam Kerangka Acuan AWPR. Sebagai langkah awal, penominasian calon wakil negara menjadi anggota AWPR disampaikan melalui wakil negara yang bersangkutan di Dewan Pelaksana AIPR. Tidak sembarang orang bisa menjadi anggota AWPR, tetapi mesti memenuhi kriteria area kepakaran yang telah ditentukan oleh Dewan Pelaksana.

Selain itu, latar belakang profesi kandidat anggota AWPR juga mesti memenuhi kategori yang telah ditentukan. Kategori tersebut adalah diplomat (Duta Besar atau *Deputy Chief of Mission*); wakil pada Dewan Pelaksana atau Badan Penasihat AIPR; pejabat pemerintahan; negosiator berpengalaman; advokat publik; akademisi atau peneliti di *think-tanks*; atau profesi lain yang dianggap perlu oleh ASEAN.

Saat ini (per Januari 2020), terdapat 24 perempuan dari sembilan negara anggota ASEAN yang telah resmi tergabung dalam

AWPR. Tujuh negara telah mendaftarkan tiga wakilnya, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Sementara Singapura mengirimkan dua orang dan Brunei Darussalam mendaftarkan satu orang. Satu-satunya anggota ASEAN yang tidak atau belum mendaftarkan nama pakar/pejabatnya untuk menjadi anggota AWPR adalah Thailand.

Dalam pertemuan perdana AWPR, beberapa anggota menyayangkan adanya negara anggota ASEAN yang belum mengirimkan pakar/pejabatnya untuk menjadi anggota AWPR. Padahal komitmen terhadap isu perempuan dan perdamaian telah diadopsi oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN.

Sementara itu, tiga orang yang diutus mewakili Indonesia di AWPR adalah Duta Besar Nurmala Kartini Sjahrir, selaku Wakil Indonesia pada *Advisory Board (AB)* AIPR, Shadia Marhaban dari *Mediators Beyond Borders International*, dan Ayu Kartika Dewi, *Managing Director* dari Indika Foundation dan *Co-Founder* Sabang Merauke Milenial Islami. Ketiganya memiliki kepakaran dalam bidang mediasi dan pembangunan kapasitas. Keragaman latar belakang para anggota AWPR dari Indonesia menonjolkan kepakaran yang unik dibanding dari negara lainnya, seperti keahlian penanganan reintegrasi *ex-combatant* yang dimiliki

oleh Shadia Marhaban dan studi perdamaian dalam Islam yang dialami oleh Ayu Kartika Dewi.

BELIA TAPI TELAH DIKENAL

Agenda lain yang juga dibahas di pertemuan pertama AWPR adalah undangan untuk bekerjasama dengan jaringan mediator maupun kelompok perempuan yang berkecimpung dalam proses perdamaian. Undangan resmi telah datang dari Regional Women Mediators Network, yang terdiri dari sejumlah organisasi/institusi di antaranya African Union's FemWise-Africa, Mediterranean Women Mediators Network, Nordic Women Mediators dan Women Mediators Across the Commonwealth. Keempat forum regional mediator perempuan tersebut hendak mengundang AWPR dan bersama-sama meluncurkan *Global Alliance of Regional Women Mediators Network*.

Selain keempat forum regional itu, juga telah terlihat ketertarikan dari sejumlah organisasi multilateral maupun negara sahabat untuk mendukung inisiatif *Global Alliance* tersebut.

Tujuan dari inisiatif *Global Alliance* adalah untuk menggabungkan dan memperkuat koordinasi antara jaringan-jaringan yang telah ada, menghindari konflik kepentingan antar jaringan yang ada, dan juga menjadi ajang pertukaran pengalaman dan *best practices*. Selain itu, *Global Alliance* juga penting bagi seluruh jaringan karena bisa saling dukung atas agenda yang diperjuangkan oleh masing-masing kelompok.

Ajakan kepada AWPR, yang usianya masih belia, untuk bergabung dalam ikatan jaringan ini menunjukkan AWPR telah dikenal oleh dunia. Komposisi para anggota AWPR yang beragam juga tentunya menarik perhatian forum regional lainnya untuk bekerja sama demi terciptanya perdamaian dunia. ■



Sumber foto: asean-aipr.org

PEREMPUAN ASEAN BICARA PERDAMAIAN

Rizky Anugerah Putera, Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN



Sumber foto: asean-aipr.org

Institut ASEAN untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi atau ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), pada 12-13 November 2019, menggelar diskusi lintas agama antar perempuan, ASEAN Women Interfaith Dialogue. Dengan dialog bertema *Promoting Understanding for an Inclusive and Peaceful Society* ini, Indonesia bersama seluruh anggota ASEAN lainnya dan AIPR berupaya memperkaya nilai-nilai inklusivitas dengan memberdayakan perempuan dalam proses perdamaian di kawasan.

Dalam pidato pembukaannya, Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi menekankan sifat-sifat perempuan yang dapat dijadikan dasar pencegahan awal sebuah konflik, peredam ekstremisme, dan juga komunikator antar umat beragama. Menurutnya, tantangan utama yang kini dihadapi masyarakat adalah bagaimana membuat pendekatan baru dalam membangun masyarakat inklusif. Dato Lim Jock Hoi

“Tidak hanya sebagai peserta proses perdamaian atau bahkan penonton, namun juga menjadi aktor utama, pemimpin, dan influencer bagi terciptanya perdamaian,”

pun mendorong perempuan berkontribusi pada pembangunan perdamaian dan masyarakat yang inklusif.

“Tidak hanya sebagai peserta proses perdamaian atau bahkan penonton, namun juga menjadi aktor utama, pemimpin, dan *influencer* bagi terciptanya perdamaian,” ujarnya.

Dialog yang digelar di Jakarta oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Pemerintah Australia dan Selandia Baru ini merupakan bentuk komitmen ketiga negara dalam memperkuat peran perempuan untuk lebih berkontribusi pada pembangunan perdamaian. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Tahunan 2020, menyatakan tekad Indonesia untuk mempromosikan isu perempuan, perdamaian dan keamanan di berbagai forum. Ini selaras dengan Pernyataan Bersama Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN soal Mempromosikan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di ASEAN dalam KTT ke-31 ASEAN pada 2017.

Melalui dialog ini, Indonesia bersama anggota ASEAN lain dan AIPR yang turut didukung oleh Australia dan Selandia Baru berupaya memperkaya nilai-nilai inklusivitas dengan memberdayakan perempuan dalam proses perdamaian di kawasan.

Sekitar 125 peserta dialog dari berbagai kalangan di antaranya anggota Dewan Pelaksana (*Governing Council*) dan Badan Penasihat (*Advisory Board*) AIPR, perwakilan negara Mitra Wicara ASEAN, kalangan akademisi dan *think-tanks*, dan anggota ASEAN Women Peace Registry (AWPR) ramai memberikan sumbang saran. Mereka berbagi pengalaman yang pernah mereka lakukan ataupun yang mereka alami dalam menjaga harmoni di masyarakat. Berbagai tantangan dan ancaman atas toleransi yang jamak ditemukan di masyarakat saat ini juga dibahas untuk mendapatkan penyelesaian bersama. Sejumlah kasus penistaan agama maupun penggunaan agama sebagai senjata kepentingan politik yang banyak terjadi belakangan ini telah menjadi keprihatinan bersama yang mengancam perdamaian.

Pada akhir acara, seluruh hasil pembelajaran maupun solusi yang berhasil dirumuskan dalam dialog dirangkum dan dijadikan rekomendasi bagi pemajuan menuju masyarakat yang majemuk dan inklusif:

- a** Pentingnya landasan konkret agar perempuan bisa berkontribusi dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Misalnya dengan pengalokasian *seat* khusus bagi perempuan dalam perundingan atau proses perdamaian, atau malah agar perempuan bisa memimpin proses perdamaian;
- b** Perubahan persepsi sosial atas perlunya pemberdayaan perempuan harus diupayakan, terutama pemberdayaan dalam hal pemulihan trauma pasca diskriminasi, misalnya bagi mereka yang berasal dari kalangan masyarakat yang terpinggirkan;
- c** Tiga pilar berkelanjutan yang dikelola oleh perempuan, yaitu pemulihan ekonomi dan rekonsiliasi (pasca konflik), ketahanan dan pembangunan sosial, serta legitimasi politik dan keamanan;
- d** Terkait toleransi antar umat beragama, dibutuhkan narasi besar yang kiranya dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Perlu diperhatikan temuan di lapangan bahwa agama bukanlah sumber konflik,



Sumber foto: Dok. Pribadi

namun lebih menjadi kendaraan politik yang merusak sampingannya adalah tumbuhnya konflik;

e Media tradisional dan media *platform* baru perlu berkolaborasi guna mencegah media menjadi pemicu perpecahan. Hal ini berkaitan erat dengan kode etik jurnalisme yang tetap harus menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi;

f Edukasi tentang perdamaian dan hidup dalam harmoni perlu diberikan kepada generasi penerus.

Selain menghasilkan beberapa rekomendasi, pada sesi lain juga dibahas usulan untuk mengoptimalkan AWPR yang beranggota para perempuan dari kalangan aktivis dan pemerhati proses perdamaian. Saat ini, AWPR masih baru, dan

sewajarnya masih mencari pijakan yang tepat untuk melandaskan karya-karyanya. Oleh karena itu, AWPR sangat perlu didukung dan didorong agar bisa optimal dalam merealisasikan visi perempuan yang aktif, bahkan memimpin dalam upaya perdamaian.

Diskusi yang terjadi sepanjang acara semakin memantapkan posisi ASEAN untuk kian melibatkan perempuan dalam dalam proses perdamaian, termasuk di level terendah. Semua partisipan juga sepakat untuk memperluas level partisipasi peserta dialog dan meningkatkan intensitas dialog yang dinilai sangat konstruktif ini. ■

PERSAHABATAN CITY OF FILM & PAPUA JENESYS 2019

Janita Jaya , Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

Sumber foto: Shutterstock



Diplomat Kemlu RI di Yamagata East High School
(Sumber foto: JTB/Mochizuki Kazuhisa)

Seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia, namun di masa modern seperti saat ini film pun dapat menjadi sarana yang memberi kita pengetahuan akan dunia. Melalui film, yang juga difasilitasi dengan akses streaming dari laman Internet, proses komunikasi antarbudaya dapat terjalin dengan lebih erat informasi mengenai budaya negara sahabat pun lebih mudah didapatkan. Ikatan persahabatan seperti ini dapat kami temukan di antara Provinsi Papua dan Prefektur Yamagata ketika kami berkunjung ke Jepang di akhir Januari lalu.

Selabels diplomat dari Kementerian Luar Negeri RI dan sembilan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua berkesempatan mengikuti program JENESYS 2019: Exchanges for Diplomats and Administrative Officials di Tokyo dan Yamagata dari 28 Januari sampai 5 Februari 2020. Dalam program ini kami berkesempatan beraudiensi dengan Kementerian Luar Negeri Jepang, instansi pemerintah dan perusahaan multinasional, Sekolah Menengah Atas (SMA) serta universitas di Jepang. Audiensi ini juga memberikan kesempatan bagi kami berdiskusi dan saling bertukar pikiran dalam membangun hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah Prefektur Yamagata. Kunjungan ke Prefektur Yamagata dikhususkan untuk mempererat hubungan *people-to-people* melalui program *homestay*

dan meningkatkan pertukaran budaya Jepang dan Indonesia. Tentunya kami sangat menantikan kunjungan tersebut. Selain ini kunjungan pertama kami ke Jepang, kami juga belum pernah merasakan menghabiskan musim dingin dengan salju berlimpah seperti yang kerap kali ditemui di Yamagata.

Di Prefektur Yamagata, kami sempat mengunjungi Yamagata East (Yamagata-Higashi) High School dan berdiskusi dengan salah seorang perwakilan siswa, Akitosh Nagasawa-Pati. Ia memaparkan kepada kami bahwa Prefektur Yamagata adalah bagian dari UNESCO Creative Cities Network, di mana Yamagata telah dikukuhkan sebagai Yamagata City of Film pada 2017. Hal ini sangat membantu ia dan rekan-rekan sekolahnya untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan kegiatan persahabatan *people-to-people* antara masyarakat Papua dan Yamagata.



Gubernur Yamagata menerima souvenir dari perwakilan Pemda Papua
(Sumber foto: JTB/Mochizuki Kazuhisa)



(Sumber foto: JTB/Mochizuki Kazuhisa)



(Sumber foto: JTB/Mochizuki Kazuhisa)

Nagasawa-Pati menunjukkan pada kami bahwa ia dan teman-temannya dari Yamagata East High School telah membuat film pendek mengenai kehidupan sehari-hari siswa SMA di Jepang yang telah diputar di sekolah di Jayapura melalui program Yamagata Film Package to the World. Film dokumenter pendek berjudul "High School Life of Yamagata" diproduksi pada 2017 oleh para siswa Yamagata East High School.

Film ini menceritakan seorang siswa baru dari luar negeri yang pindah ke SMA di Yamagata, di mana teman-teman sekelasnya menceritakan bagaimana kehidupan siswa SMA di Jepang. Film ini kemudian diputar selama kunjungan perwakilan siswa Yamagata East High School di SMKN 1, SMAN 4, SMKN 2, SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura, Provinsi Papua, pada Maret 2019. Di kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, per-

temuan antara siswa SMA di Yamagata dan Papua dilakukan dengan *video conference* melalui Skype.

Nagasawa-Pati yang juga merupakan perwakilan siswa Yamagata East High School pada kunjungan ke Jayapura, menjelaskan bahwa pelajar SMA di Papua terlihat sangat antusias untuk mengetahui bagaimana kehidupan pelajar di Jepang. Para siswa juga



Sumber foto: JTB/ Mochizuki Kazuhisa

Kami telah mempersiapkan kameraterbaik untuk mengabadikan momen istimewa tersebut melalui foto maupun video.

tertarik untuk mempelajari budaya Jepang, khususnya mereka yang mempelajari Bahasa Jepang sebagai mata pelajaran bahasa asing di sekolah. Sebaliknya, Nagasawa-Pati menceritakan pada kami bahwa ia pun tertarik untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas dengan program studi kawasan Indonesia.

Dalam kunjungan kami ke kantor Pemerintah Daerah Prefektur Yamagata, Gubernur Mieko Yoshimura mengemukakan perkembangan kerja sama sister city antara Provinsi Papua dan Prefektur Yamagata yang telah berjalan lebih dari 20 tahun. Kerja sama ini mencakup bidang pertanian, pertukaran teknologi, dan budaya. Selain itu, Prefektur Yamaga-



Peserta JENESYS 2019 menyempatkan bermain salju
(Sumber foto: Dok. Pribadi)

ta memiliki Yamagata-Papua Friendship Association, yang turut mempromosikan pertukaran budaya antar masyarakat Papua dan Yamagata. Gubernur Yamagata juga berharap warga Indonesia yang dapat berkunjung, bekerja, dan belajar di Prefektur Yamagata bertambah.

Pada hari terakhir kunjungan di Yamagata, kami dan keluarga *homestay* kami menyempatkan diri bermain salju di berbagai tempat di prefektur itu. Kami telah mempersiapkan kamera terbaik untuk mengabadikan momen is-

timewa tersebut melalui foto maupun video, sehingga keluarga dan teman-teman di Indonesia dapat melihat catatan perjalanan kami. Siapa tahu di antara kami akan ada yang membuat film pendek persahabatan Indonesia-Jepang selanjutnya. ■



(Sumber foto: JTB/Mochizuki Kazuhisa)



Peserta JENESYS 2019 dengan keluarga homestay di Yamagata (Sumber foto: JTB/Mochizuki Kazuhisa)

VICTORIOUS INDONESIA AT WORLD UNIVERSITIES DEBATING CHAMPIONSHIP

Adfikri Kevin Marvel, Directorate of ASEAN External Cooperation



Team from Indonesia (ITB) who won EFL category of World Universities Debating Championship (WUDC) 2020 in Thailand. (Sumber foto: Dok. Pribadi)

Many people do not know that Indonesian universities for many years have been involved in various international competitions. For example, United Asian Debating Championships (UADC), Asian British Parliamentary (ABP), Australasian Intersivity Debating Championships (Austral) and the Olympics of debating – World Universities Debating Championship (WUDC/Worlds). The last edition of Worlds was held in Bangkok, Thailand, from December 27th 2019 to Janu-

ary 4th 2020 (colloquially known as Bangkok Worlds 2020).

Bangkok Worlds 2020 was joined by 353 teams from various countries, including some well-renowned universities such as Harvard, Yale, and Oxford participated in the Worlds. Indonesia sent 21 teams to the competition. What make us proud is one of them, Bandung Institute of Technology (ITB) team won Worlds in EFL (English as Foreign Language) category.

In the competition, Worlds uses British Parliamentary format: four teams with two people for each team in a round. Its elimination rounds - should teams secure enough points during preliminary rounds - are divided into three categories: Open/EPL (English as Primary Language), ESL (English as Second Language), and EFL (English as Foreign Language). Although there is language categories, it doesn't make Indonesian team will automatically go to EFL bracket. Hence, if Indonesian teams managed to get enough Vic-



Indonesia delegation for WUDC 2019 in Cape Town. (Sumber foto: Dok. Pribadi)



Indonesia (Government-funded) delegation for WUDC 2019 in Cape Town welcomed by Consulate General of the Republic of Indonesia in Cape Town. (Sumber foto: Dok. Pribadi)

tory Points (VPs) during the prelims, they will also be eligible to go to ESL category or even Open category.

As a two-time alumni of Worlds myself, I know that this recent achievement is not something surprising. Indonesia teams has got through elimination rounds in both ESL

and EFL categories consistently for quite some time. Universitas Indonesia went all the way to the grand final of ESL category in Malaysia Worlds 2015, Thessaloniki Worlds 2016, EFL grand final in Thessaloniki Worlds 2016, and Cape Town Worlds 2019. I myself broke to the elimination rounds in two Worlds: EFL semifinal of Mexico Worlds

2018 and ESL quarter final of Cape Town Worlds 2019, snatching 6th Best EFL Speaker of 2019 (of the competition). So I know that to win in the competition participants need a combination of individual and team dedication in proliferating parliamentary debating, and government support, not to mention luck also needs to play its role, especially in the tightly-contested elimination rounds – where the gap between each team arguably is paper-thin.

In the true spirit of critical thinking and arguing or debating for something important, I would like to propose three arguments why Indonesian institutions' participation in Worlds and Indonesia's government support from behind should be an integral effort for getting even better achievement in international debating tournaments, and to advance Indonesia's interest as well.

a. | Critical thinking habituation, understanding competing in thoughts and arguments based on principles, reasons, alternatives, comparison

Firstly, competing in Worlds in particular, and competitive debating in general, habituates the culture of critical thinking and deliberative capacity. I think these are two of the most important skills that we tend to forget. There are so many issues in our lives we may be unable to pay attention to due to the banality of life, but understanding how to assess ideas, principles, reasons, and comparing between them is, I would argue vehemently, an integral part of human as social being. Debating allows you to compare between Kantian deontology vs Bentham's utilitarianism, it forces you to be factual and read relevant information on many things, from high-politics issues such as US politics, Brexit, conflict in Middle East to relatively low-politics issues, such as feminism and micro-aggression, criminal justice system, parenting and pedagogy, etc.

Debating makes you have to think and build an argument even for ideas that do not exist yet, case in point with "assuming feasibility" motion, such as "This House Prefers a world where, starting today, all humans have identical intellectual abilities equivalent to the current global average" or "Assuming it is possible

to determine a person's natural born talent (i.e. singing, dancing, athleticism), This House Would prohibit them from monetizing that talent", motions like these push you to think beyond what is conceivable now and go deeper to the philosophical reasoning irrespective of the question of whether or not there is a technology to do something and possible practical comparisons of which vision of world is more ideal because we can "reset" the world all over. This incommensurably increase intellectual exercise given people cannot hide behind the veneer of "ah it can't be done, why bother discussing it" and any similar blockage to thought experiment, as we develop philosophical base for ourselves in regards to what is actually a desirable way to live and the kind of world we want to be a part of. Through debating I develop further my passion for knowledge and research. I

get to know deeper about US politics and its spectrum. I get to know exactly what are blue dog democrats, yellow dog democrats, and the differences between neo-conservative, classical conservative (libertarian), liberal in the era Franklin Roosevelt and the so-called neo-liberals after the rise of Bill Clinton. I also look deeper on how the "New Deal" during President Franklin Roosevelt's term in office is compared to the proposal of "Green New Deal" pushed by left-wing politicians from Democratic Party such as Alexandria Ocasio Cortez today. I develop further my love for philosophy and great minds such as Michael Sandel, Richard Dagger, John Rawls, and read even philosophers I disagree almost wholeheartedly such as John Nozick. Debating gives you purpose to read, either to win a round, or to find joy and get amused by how the world works. Through debating we will

know the reasons behind arguments in favour or against a certain policy, which I think should be the foundation of our civil discourse.

b. | Preparing future generation

Debating is also a very meaningful way to develop youth as the future of the nation. It is arguably significant in fostering inter-generational solution to the youths' mindset. This good image may very well contribute to the positive perception of how a state is attempting to fulfill the potential of their human resources for years, and even decades to come. This goes on to show that appropriate support from governmental structure towards debating can be capitalized and mutually beneficial both for the debating community, and the government supporting them.

One of the closest study case to Indonesia (despite its own success), possibly is Malaysia with UT MARA and IUM relatively regularly breaking in Open/EPL category of Worlds, even in 2017 UT Mara reached Semifinal round of Dutch Worlds as well as having both debaters snatching Co-4th and Co 9th Open Best Speaker awards. Malaysian teams have also in a number of occasions won Australasian-level Open category competition, beating the natives from Australia and New Zealand alike, something Indonesian teams may still have to wait to do for several foreseeable years to come. This comes from relatively well-known effort from Malaysian government, in terms of providing funding and training camps to their crème de la crème in high-school level such as World Schools Debating Championship (WSDC).

The concrete way to which Malaysia attempt to make the debating progress more sustainable is by formalizing it through Malaysian Institute for Debate and Public Speaking (MIDP). MIDP managed and coached Malaysian high-school national team which ranked 1st during the preliminary rounds for WSDC in 2018 and also convened Worlds 2015 held in Malaysia. MIDP position itself, is not under the Malaysian Ministry of Education, but rather, they provide consultancy to such agencies and its appointment as Malaysian WSDC trainer suggest that this cooperation is working and working very well. MIDP also eventually managed

Through debating we will know the reasons behind arguments in favour or against a certain policy, which I think should be the foundation of our civil discourse.



Sumber foto: itb.ac.id



Indonesia delegation for WUDC 2018 in Mexico City. (Sumber foto: Dok. Pribadi)

to work with multiple other partners and both strengthen as well as widen its influence in Malaysia, even Australasian region. MIDP has affiliation with government agencies such as the aforementioned Ministry of Education of Malaysia and Ministry of Youth and Sports of Malaysia, private organizations such as McKinsey and Berjaya, educational institutions such as Australian International School Malaysia and Taylor's University, even to the extent of working with prominent Civil Society Organizations (CSO) and NGOs such as Transparency International Malaysia and UNICEF.

Similar pathway has been actually attempted by Indonesian debating community by trying to formalize the creation of Indonesian Debating Union (IDU), however, its progress has been stalled in the recent years to say the least, and maybe government's help would be mutually beneficial for both Indonesia debating community and the government. IDU, among others, found obstacles in funding and logistical adequacy just like many other infant organizations especially added with the landscape of Indonesia's archipelagic condition. In this case, government's provision of funding with agreed method of supervision might enable further debate proliferation envisioned by IDU and almost everyone if not everyone in the debating scene. Such

method of cooperation I really believe will enable further growth for Indonesian debating community which impacts not just the proliferation per se but also the level of competitiveness in each tournament and will more likely than not manifest into greater achievement in the international competitions as well.

Should it happen the way I think it most likely will, then the State is benefitted in twofold: first, the government would be

We compete hard against each other, but we will show sportsmanship if we lose, and most importantly, in Worlds, we root for each other because we meet relatively regularly especially when any of us put in the same chamber against teams from the English-speaking countries.

able to claim success over a great deal of improvement and competitive thinking-and-speaking skills compared to other countries which elevates the status of Indonesian youths and might very well be able to slowly but surely remove the stereotype of third world countries especially from people in the Western hemisphere.

Secondly, the State would also enjoy better human resources, and more likely than not it's going to be cost-effective, the vast majority of debaters care about debating proliferation because of their passion and not because of money, money only become a hindrance in enabling them to go places, so the State would also at the very least get to have more equal level of decent human resources across the board in the long run.

C. | Developing Network

Thirdly, and this is more from the angle of the debating community and debaters: you surely will develop your English (and English for debating can be slightly different in lingos than daily conversational or academic journal's English although there may be some overlapping here and there), you widen your networking, and also you get to make friends with other talented youths from other cities, other countries, even from all over the world! Because of assorted international competitions I mentioned earlier for instance, I got to know awesome friends especially from Australasian region, mostly from Malaysia, Singapore, and some from Australia. We compete hard against each other, but we will show sportsmanship if we lose, and most importantly, in Worlds, we root for each other because we meet rel-

atively regularly especially when any of us put in the same chamber against teams from the English-speaking countries.

As an anecdotal example, I get to know some awesome friends from Malaysia having joined two Asian British Parliamentary, two Australasian Intervarsity, Gandhi Memorial Trust Debate, and



Sumber foto: WUDC 2020

other international competitions together, I get to know prominent debaters from International Islamic University of Malaysia (IIUM), National University of Singapore (NUS), University of the Philippines (UPD) and some Australian universities like Australia National University (ANU), University of Sydney, Macquarie University, and Monash University. It was very enjoyable to see people who were surprised to know I and my teammate came from Indonesia because they had this pre-conceived notion of how Indonesian's proficiency of English is, and I honestly can say my confidence level in public speaking and using English improved exponentially due to debating.

After winning ASEAN-level Gandhi Memorial Trust Debate in 2018, me and my two teammates from Universitas Indonesia were also offered Internship opportunity along with prize money in Malaysia after beating the likes of IIUM, (NUS), and (UPD). We were offered to intern in Zico law firm, ASEAN Post, or MIDP which

shows competitive debating also flourishes networking perks and that it affirms skills that are highly demanded now such as critical thinking, public speaking, problem-solving, teamwork, etc. Because of debating I get to know possibility of jobs both in Indonesia and elsewhere, I think the fact that many debaters, are considered as highly valued assets for their employers mean that their personal recommendation about other debaters are also often taken into account which means that as a part of debating community not only do you get the thrills and benefits when you are active in the circuit, but you will also be benefitted with the kind of people you are now connected with.

Next step: upwards - and further proliferation

In conclusion, Indonesia's recent debating achievement is awesome, but it is neither surprising nor should it be satisfying that we stop trying to climb even further, to aim much higher, and to hustle. There are many ways to which both the community and the

government can find to accommodate each other's need and interest. There have been some exemplary instances to which Indonesian teams managed to rise above the occasion and won over teams from a more developed debating culture, but, we can, and we need to, make the progress even more sustainable to ensure that all the benefits I have elucidated do not become the benefits only enjoyed by some so-called 'powerhouse' institutions in Indonesia, but rather can be spread more proportionately and also improve our standing internationally. ■



Financial technology, commonly called fintech, is now a highly used buzzword. Although there is no rigid definition of what is defined within the confine of fintech. The term itself is commonly associated with startups that are competing with traditional financial services, and offer customer-centric services with a combination of speed and flexibility. Examples of fintech in Indonesia you may have heard are Go-Pay, Ovo, Kredivo, Xendit, Doku, and Midtrans.

The massive conversation we have about it suggests that the presence of fintech is spreading throughout the world as they radically change the way financial industry engage with the customer and the expectations between customer and service provider. Customers get to experience more digitalization of services, with features that give immediacy and availability of informa-

tion within the customers' gadgets such as smartphones and tablets become more prevalent in terms of its public presence due to the ever more connected world we are seeing today.

I would like to discuss three things here. Firstly, the reason why the economics of fintech is extremely attractive right now. Secondly, I would like to address the concerns of possible downsides. The last one is the pre-requisites I believe is necessary to foster fintech development, especially in the Southeast Asia region.

It is very integral to discuss how fintech makes even traditional financial organizations such as banks and insurance companies are changing their strategy to minimize the gap between fintech and these traditional organizations which can be interpreted as the massive impacts of fintech

disrupting the previously established economy. It is very interesting to understand the development of this platform and how Southeast Asia region can potentially be a springboard to broader Asia.

Firstly, let's talk about the reason why the economics of fintech is attractive in the current context. Fintech first and foremost puts strong emphasis on customer centricity and cost innovation, both are what I perceive to be the reasons why market is responding so well to the industry.

According to a TransferWise survey, the five main factors that prompt consumers to choose technology providers over banks are: a more secure service (34%), a lower cost (29%), a more convenient service (26%), a quicker service (18%), and a better customer service (18%). This essentially means that even the customers perceive

their voice are being heard more and their interest are catered better by fintech in comparison to existing conventional financial service.

The fact that fintech is seen more accommodative by the customer also means that fintech initiatives cover a very wide range of financial areas and numerous aspects of people's lives. For instance, Lending Club, one of the world's largest peer-to-peer lending platform, directly connects borrowers and investors by making credit more affordable, investing more rewarding, and promoting a completely new loan program.

Kickstarter, a very large funding platform for creative projects, has strongly increased the level of accessibility of funds for startups or simple projects. Wealthfront embodies a fusion between finance and automation, allowing the management of assets through complex algorithms. CommonBond is a marketplace lender that refinances graduate and undergraduate student loans. It has lowered the cost of student loans and allowed saving an average of 14,000 dollars over the lifetime of the loan.¹ Some cases above show how fintech impacts people's lives and its grasp challenges conventional financial services. As an example, the South Korean government realizes that fintech initiatives are changing the nature of finan-

cial services and therefore highly regulates the industry. They are worried about the viability of its existing banking infrastructure going forward.

In terms of cost innovation, we can also understand that fintech does not require as much physical infrastructure as the conventional financial services due to its nature (e.g banks and insurance companies will have buildings, building management fee, more employees, land, etc.). Fintech can essentially minimize the cost or expenditure on said aspects and create a more dynamic business model.

Their profit do not have to be reinvested on infrastructures, that will be depreciated and have to be managed (costly). The money can be allocated for innovation instead. Unless fintech companies manage to constantly innovate to reduce cost and to gain competitive advantage over their competitors, then there is virtually no guarantee that they will be able to maintain customers who have better financial literacy.

These customers oftentimes are very price-sensitive (look at the discount war between Gojek and Grab in Indonesia for example) and the customers would be willing to move away with minimum brand loyalty to avoid high charges. This goes back

to customer-centricity point as well which points out how customer centricity is the intrinsically most pertinent feature of the industry.

Secondly, regarding possible downsides. There are few possible downsides that people think fintech poses, mostly it is due to the ways they are used. Some people are concerned the security aspect of fintech. However the big chunk of this point is highly contingent on individual's or company's complacency to assume their platform as a fortress.

Possibility of attackers and hackers that are highly organized may very well be there, so the concern is legitimate, but similar risk of highly-organized group of people attacking conventional financial institution is also there. Therefore, the logical consequence should be that wary of such possibility is incredibly important and complacency must be avoided at all cost.

Another possible downside people fear, and somewhat more solid than the concern about security, is regarding regulations-related obstacles. Due to the aspect of technology and how wide the range of businesses within the platform, it is going to be difficult for the regulatory agencies to regulate it, especially in dealing with possible in-

ternational sovereignty aspects, protection of customers' data, legal jurisdiction, and taxation. Therefore, it is of the utmost importance that any regulatory agency assigned by the state is committed and capable to coordinate with relevant parties to avoid this obstacle.

Finally, let's elucidate further the pre-requisites needed to foster fintech development, especially in the Southeast Asia. Before we dig this issue deeper, we can clearly recognize the development of fintech as alternative financial transactions in the region, particularly once we take a look at the numbers in the relatively more developed countries. Southeast Asia accounted for US\$47 million trans-

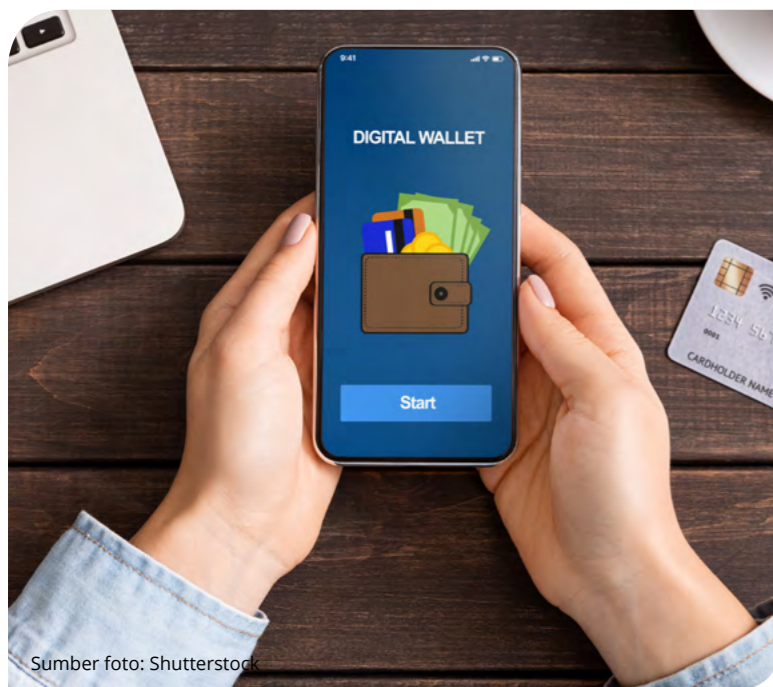
Indonesia can learn and follow the steps of Singapore as one of the best practice on the fintech development. Ministry of Communication and Informatics

actions in 2015. There are at least two important points to foster fintech development further, for sure creating conducive business environment is the key for said development: government support and good sentiment on the economy.

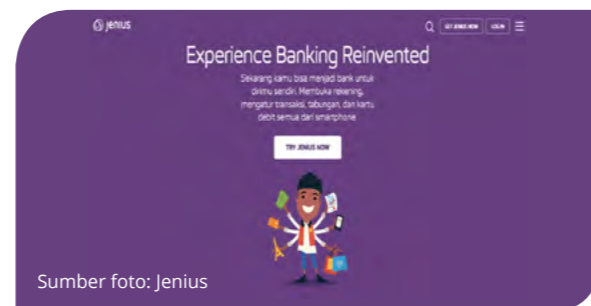
Regarding the first point, Singapore can be a very good example. Entrepreneurship and innovation are heavily supported by government related entities such as SPRING Singapore, International Enterprise Singapore ("IE Singapore"), Singapore Economic Development Board ("EDB"), and Infocomm Development Authority of Singapore ("IDA").² These organizations have been purposefully pushing initiatives aimed at encouraging and fostering innovation and entrepreneurship in the local scene. Singapore's strong legal framework also provides a high degree of comfort and stability for fintech companies to operate in their land.



Sumber foto: Shutterstock



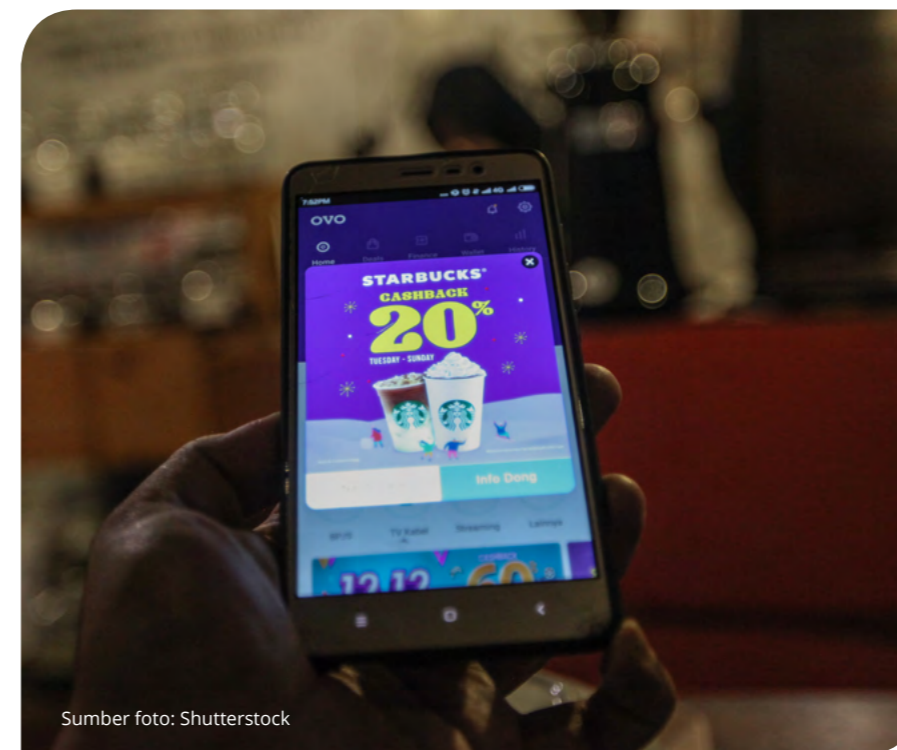
Sumber foto: Shutterstock



Sumber foto: Jenius



Sumber foto: Shutterstock



Sumber foto: Shutterstock



Sumber foto: Shutterstock

Finally, there is a tangible surge in information and content generation related to fintech. Renowned educational institutes like Singapore Management University ("SMU") have established several centres such as the Financial IT Academy ("FITA") or the Sim Kee Boon Institute for Financial Economics ("SKBI"), while several local banks have been exploring executive development programmes with an emphasis on fintech.

This level of government support can, and probably should, be adopted to refine the fintech culture that hopefully will contribute to greater interest of investors and public.

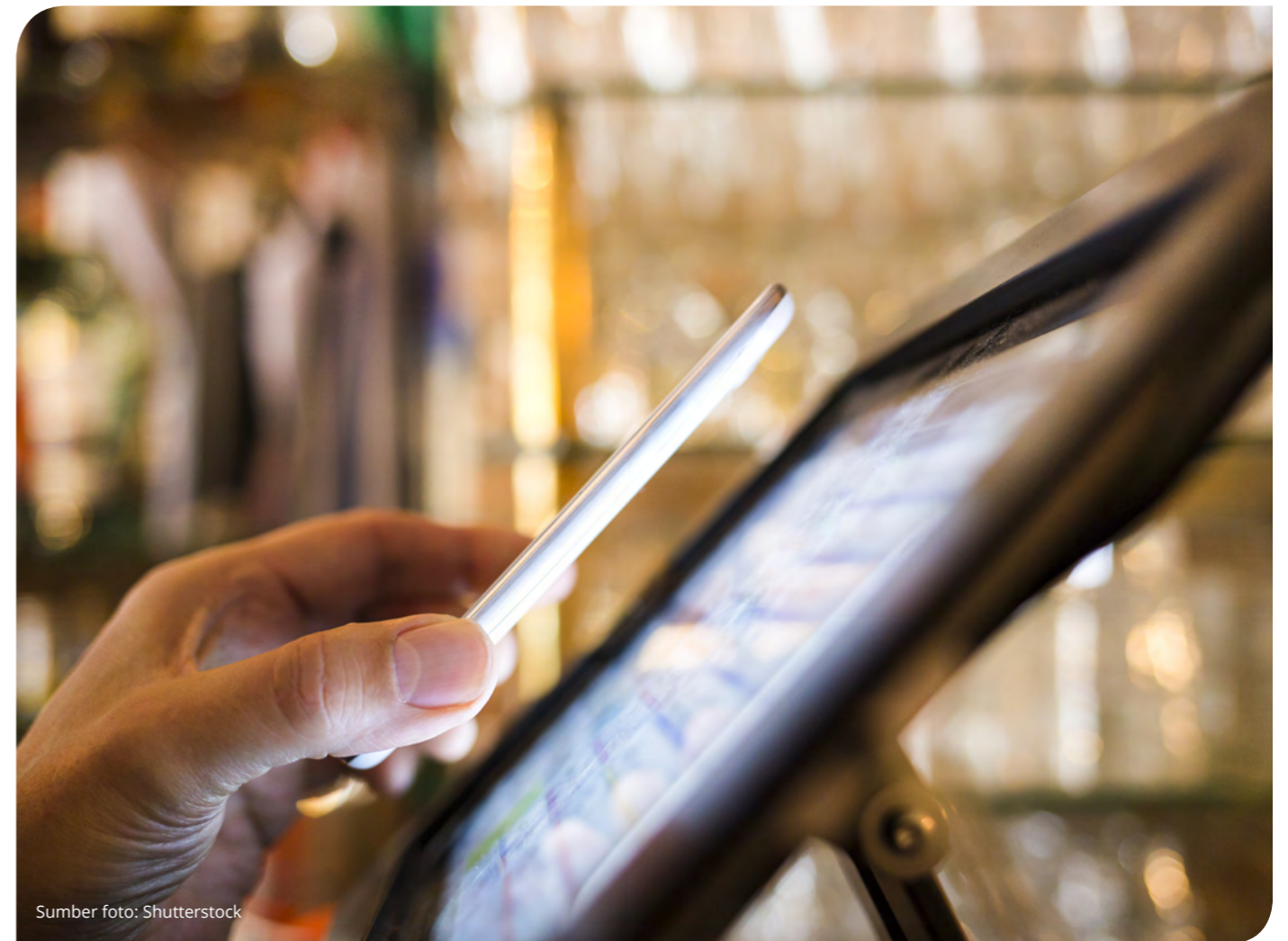
Education sector that is directed to teach and foster the development of fintech and habituate people with fintech activities.

Government support can be done through various ways -- among others, building stable basis of political and economic stability for the country, stringent regulatory framework, efficient administrative process, and public-private partnership can be among the ways to position the country strategically to launch the industry to the next level.

If this can work immensely well for Singapore, then it may provide even more benefits for more populous countries like

Indonesia, Malaysia, Vietnam, Philippines or Thailand. It might give bigger multiplier effect to the people.

Regarding the second point, good sentiment on the economy, this is involving multi-faceted aspects to help foster fintech development. It is not as simple as "what market thinks", but there are different actors with nuanced interests and different ways to satisfy. Customers' interest for instance, need to be catered by synergies between customer, financial institution, corporation, and government. Investors' interest can be catered differently as well depending on the type of investor. It can be



Sumber foto: Shutterstock

an angel investor, venture capital, or retail investor.

The corporation can be satisfied when there is a sufficient regulatory support and availability of talents which may require the country to invest on academic institutions and/or specific mandatory subjects related to fintech to be taught. This may be perceived as cost by some people but it needs to be done nonetheless.

The aforementioned points are very necessary given how (at least as of now) dependent fintech initiatives are to the rate of economic growth. The fintech market has experienced an increase in two critical aspects: investment and market size. This has to be taken into account especially when we are talking about the ROI (return on investment) of these new fintech initiatives/startups.

In 2014, investments in fintech business ventures in the world tripled to US\$12.21 billion, contributing to global growth of 201% compared to the previous year. According to Venture Scanner, at the end of 2015, there were 1,379 fintech companies with a total funding amount of US\$33 billion.³ These figures even do not include fintech initiatives in traditional financial institutions.

This suggest there is a correlation between the overall economic growth and the growth of fintech companies. A possible explanation for this possibly because fintech companies need to attract large quantities of assets, either from the number of customers or total amount of their customers' assets – what is often called Assets Under Management (AUM). Fintech will find it hard to generate profit otherwise, and that is why government support and senti-

ment on the economy correlate to fintech profitability and development.

Indonesia can learn and follow the steps of Singapore as one of the best practice on the fintech development. Ministry of Communication and Informatics (Kemenkominfo), Indonesian Banks Association (Perbanas) and several fintech groups/associations, such as Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) and Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) can work together to amass the interest of fintech companies and startups.

At the end, the constant development of technology will inevitably lead to its permeation to various aspects of life, financial service included. Also those who are the most apt in responding to that, will be the ones who get the benefits the most. ■

KEKETUAAN VIETNAM DI ASEAN 2020

Mengawali 2020, tim Majalah Masyarakat ASEAN ingin mendekati pembaca dengan sosok Bapak Ibnu Hadi, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam. Sebagaimana kita ketahui bersama, tahun ini merupakan tahun keketuaan Vietnam di ASEAN. Untuk itu, marilah kita ikuti wawancara tertulis Duta Besar Ibnu Hadi dengan tim MMA mengenai tanggapan dan pandangannya terhadap keketuaan Vietnam di ASEAN 2020.

Bagaimanakah pandangan umum Bapak terkait keketuaan Vietnam dan isu-isu prioritas apa yang akan diusung?

Tahun 2020 menandai 25 tahun perjalanan Vietnam sebagai anggota ASEAN. Selama kurun waktu tersebut, Vietnam senantiasa berkontribusi secara aktif dalam mempertahankan kesatuan, perdamaian, dan keamanan di kawasan serta dalam pembangunan komunitas ASEAN. Keketuaan Vietnam tahun ini selain merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, namun juga memberikan kesempatan bagi Vietnam untuk berkontribusi secara lebih substantif pada pembangunan dan pertumbuhan masyarakat ASEAN yang harmonis, tangguh, inovatif, bertanggung jawab, dan adaptif.

Sebagaimana diketahui, dalam keketuaannya, Vietnam mengusung tema *Cohesive and Responsive*. *Cohesiveness* melambangkan persatuan dan solidaritas ASEAN dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal, pengembangan integrasi ekonomi kawasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat ASEAN. *Responsiveness* menggambarkan harapan Vietnam untuk mendorong ASEAN menjadi lebih proaktif dalam memperjuangkan kepentingan kawasan saat menghadapi krisis.

Sebagai ketua ASEAN, Vietnam bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan ASEAN selama satu tahun. Salah satu tugas utamanya adalah mengarahkan program dan materi yang mencakup topik, prioritas, dan inisiatif serta mengoordinasikan para anggota ASEAN dan negara mitra. Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu isu penting mengingat sengketa tersebut merupakan tantangan tidak hanya bagi intra-ASEAN tetapi juga ujian bagi kerangka ASEAN dalam mengelola hubungan negara-negara besar di kawasan. Isu ini sejalan dengan prioritas Vietnam sebagai Ketua ASEAN yang pertama yaitu meningkatkan peran dan kontribusi ASEAN dalam memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan atas dasar persatuan dan kesatuan ASEAN.

Untuk itu, saya optimis bahwa dalam menjalankan perannya sebagai Ketua, Vietnam akan melanjutkan upaya dan capaian para Ketua ASEAN sebelumnya dan bekerja dengan seluruh negara anggota untuk memperkuat sentralitas ASEAN serta mengidentifikasi arah masa depan masyarakat ASEAN hingga tahun 2025 dan seterusnya. Saya juga percaya bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki kepentingan strategis yang saling berkaitan, maka kedua negara perlu bekerja sama di segala tingkatan, di bidang politik, ekonomi, maupun sosial, untuk memperkuat ASEAN.

Menurut pandangan Bapak, peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi Vietnam sebagai Ketua ASEAN 2020?

Vietnam telah menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi ASEAN dan Indonesia pada khususnya, dan saya percaya Vietnam akan menunaikan dua tugas besarnya dengan baik, yaitu sebagai Ketua ASEAN dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Tahun 2020 akan membawa banyak kesempatan dan tantangan bagi keketuaan Vietnam. Saya yakin bahwa Vietnam dan anggota ASEAN lainnya dapat mendorong kerja sama global melalui kerangka ASEAN karena posisi ASEAN telah diakui dan dihargai oleh komunitas internasional.

Selama beberapa tahun ke belakang, Vietnam juga telah berjuang untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saat ini, Vietnam berada di posisi yang lebih kuat. Hanoi berhasil menunjukkan kepemimpinannya melalui kinerja ekonomi yang mengesankan.

Tantangan besar bagi ASEAN bukan hanya mempertahankan peranan utamanya di dunia internasional tetapi juga bagaimana organisasi intrakawasan ini dapat berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi, perdagangan, serta keamanan baik di kawasan maupun secara global. Terkait isu ekonomi, saat kita bekerja sama dalam kerangka ASEAN, kita perlu memperhatikan tidak hanya kerja sama dengan negara-negara maju, tetapi juga berupaya untuk mendorong negara anggota seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja ikut berkembang. Efektivitas keketuaan

Sumber foto: Dok. Pribadi

Sumber foto: Dok. Pribadi

Vietnam salah satunya akan dapat diukur dengan upayanya untuk membawa negara-negara tersebut ke jalur pembangunan yang tepat.

Selain itu, perkembangan terakhir terkait dengan penyebaran coronavirus (COVID-19) menjadi tantangan terbaru bagi Vietnam sebagai Ketua ASEAN. Dalam hal ini, ASEAN harus bersiap untuk kemungkinan terjadinya resesi global karena perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mungkin berdampak tidak hanya pada negara-negara di Asia tetapi juga negara lain di dunia. Dalam hal penanganan coronavirus, pada 4 Februari 2020, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc melalui telepon telah berdiskusi membahas kerja sama regional untuk menghadapi wabah penyakit. Kedua pemimpin negara sepakat bahwa ASEAN harus proaktif dalam mengoordinasikan rencana penanganan coronavirus sesuai dengan tema ASEAN tahun ini, *Cohesive and Responsive*. PM Phuc juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengambil langkah-langkah pencegahan dalam menanggulangi coronavirus. Kemudian pada 15 Februari 2020, telah dikeluarkan Chairman's Statement on ASEAN Collective Response to the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 yang menekankan komitmen ASEAN sebagai organisasi kawasan untuk bersatu dan menangani permasalahan ini secara bersama-sama demi kemaslahatan masyarakat dan pembangunan di kawasan dan di dunia.

Dalam kerangka kerja sama bilateral, Vietnam dan Indonesia telah membangun kemitraan yang saling percaya. Kedua negara memiliki sikap dan pandangan yang sama dalam beberapa isu kawasan dan global. Indonesia juga mencatat dukungan Vietnam terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang telah diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Juni 2019. Indonesia siap membantu Vietnam dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi Vietnam saat menjadi ketua ASEAN.

Menurut Bapak, strategi apa yang akan dilakukan Vietnam dalam mewujudkan ASEAN yang Cohesive dan Responsive, dan manfaat apa yang dapat Indonesia ambil?



Sumber foto: Dok. Pribadi

Vietnam akan melanjutkan capaian keketuaan sebelumnya dengan tetap memusatkan tujuan, identitas, dan sasaran utama Masyarakat ASEAN pada perdamaian, stabilitas, persatuan, kesejahteraan, dan keberlangsungan. Nilai-nilai ini diharapkan dapat membuka jalan bagi ASEAN untuk tumbuh dan bersiap memasuki dekade ketiga pada abad ke-21, lebih mendekati ASEAN kepada masyarakat dan mengomunikasikan semangat Masyarakat ASEAN kepada dunia.

Keketuaan Vietnam di ASEAN diharapkan dapat berfokus untuk memperkuat persatuan ASEAN yang berkelanjutan baik pada isu politik dan keamanan juga isu ekonomi dan sosial budaya. Vietnam telah mempelajari dan mengusulkan inisiatif jangka panjang yang berkelanjutan sehingga meski setelah selesainya masa keketuaan Vietnam, inisiatif yang diusulkan dapat terus digalakan dan diimplementasikan. *Cohesive and Responsive* yang diusung Vietnam menekankan peran sentral mekanisme ASEAN dalam menangani isu yang

berkembang, menghadapi tantangan bersama di kawasan Asia Tenggara.

Dalam kaitan ini, sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri RI mengenai prioritas kebijakan luar negeri Indonesia periode 2019-2024, ASEAN masih menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia ingin memastikan bahwa kerja sama Indo-Pasifik dapat diimplementasikan dengan sukses. Selain itu, Indonesia juga sedang memperjuangkan narasi ASEAN Identity dan mengupayakan peran ASEAN di kawasan, membuat masyarakat ASEAN lebih merasakan manfaat ASEAN, serta mendorong ASEAN menjadi lebih adaptif melakukan reformasi untuk memastikan efisiensi dan efektifitas organisasi termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023 sehingga dengan mendukung Vietnam dalam kepemimpinan ASEAN tahun ini akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan keketuaan yang kuat dan optimal tiga tahun yang akan datang

“Vietnam akan melanjutkan capaian keketuaan sebelumnya dengan tetap memusatkan tujuan, identitas, dan sasaran utama Masyarakat ASEAN”



Duta Besar Ibnu Hadi berdiskusi dengan Deputy Director of the Protocol Department, Phan Kieu Nga di sela-sela Advanced Visit the 36th ASEAN Summit (Sumber foto: Dok. Pribadi)

Sebagai Ketua ASEAN, peranan apa sajakah yang diharapkan dari Vietnam dalam mendorong perundingan-perundingan yang belum tuntas di tahun sebelumnya?

Tahun 2020 merupakan peringatan lima tahun terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan masa yang tepat untuk evaluasi jangka menengah pembentukannya. Cetak Biru MEA 2025 telah menetapkan upaya promosi MEA sebagai *“a highly integrated and cohesive economy”* dan *“a competitive, innovative, and dynamic ASEAN”*. Keketuaan Vietnam di ASEAN perlu difokuskan untuk mendorong aksi nyata dalam mewujudkan hal tersebut.

Selain itu, Vietnam juga diharapkan dapat mempertahankan kepemimpinan ASEAN melalui upaya penyelesaian perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang optimal agar dapat ditandatangani tahun ini.

Indonesia juga mengharapkan agar ASEAN *Narrative on ASEAN Identity* yang saat ini sedang dibahas pada pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN dapat diadopsi pada tahun 2020 untuk mempromosikan identitas, kesadaran, dan kebanggaan ASEAN.

Adapun tantangannya adalah agar Vietnam dapat mendorong pemahaman yang sama di antara para anggota ASEAN yang menjadi pihak dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan mendorong penyelesaian Code of Conduct yang dapat menjadi dokumen legal yang mengikat. Selama ini negosiasi antara ASEAN dengan Tiongkok sangatlah sulit dan berliku. Vietnam dapat mengupayakan pembicaraan isu terkait LTS dalam berbagai diskusi informal maupun retreat dengan negara anggota lainnya.

Isu konektivitas menjadi hambatan bagi Indonesia dalam menarik investasi asing. Bagaimanakah Indonesia dapat memetik manfaat dari konektivitas ASEAN?

Peningkatan konektivitas merupakan salah satu kunci untuk mempererat hubungan perdagangan dan *people-to-people* baik dalam konteks bilateral dengan Vietnam, maupun dalam kerangka ASEAN. Konektivitas ASEAN mencakup keterhubungan infrastruktur fisik (transportasi, Information and Communication Technology/ICT, energi), institusi (perdagangan, investasi, dan liberalisasi layanan), serta aspek *people-to-people* (pendidikan, budaya, pariwisata) yang mendukung pencapaian Masyarakat ASEAN yang terintegrasi.

Salah satu prioritas yang diusung Vietnam adalah meningkatkan konektivitas kawasan dan memanfaatkan peluang Revolusi Industri 4.0 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, keuangan, dan sosial secara berkelanjutan dan inklusif berdasarkan inovasi dan penerapan teknologi digital dan teknologi baru. Selama masa keketuaannya, Vietnam berharap agar Masyarakat ASEAN dapat memupuk konektivitas dan memperdalam integrasi di dalam dan di luar kawasan berbasis inovasi, stabilitas, dan pengaruh Revolusi Industri 4.0 pada kehidupan masyarakat.

Dengan diadopsinya ASEAN's *Outlook on the Indo-Pacific* serta rencana penyelenggaraan ASEAN-WEF *Forum on Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity* pada tahun ini di Jakarta, Indonesia memiliki kesempatan untuk mendorong perluasan atau memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, bisnis, pariwisata, maupun *people-to-people* dalam kerangka *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025* yang diadopsi pada 2016.

Apa yang dapat dipelajari para pemuda Indonesia dari Vietnam untuk dapat meningkatkan kompetensi di tengah persaingan kerja di ASEAN?

Vietnam memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan, diantaranya kekayaan sumber daya alam, tersedianya tenaga kerja usia muda yang memiliki keterampilan/keahlian tertentu, pasar konsumen yang besar, serta situasi politik yang stabil. Arus investasi asing ke Vietnam diperkirakan terus meningkat seiring dengan usaha Pemerintah Vietnam untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi, serta mengurangi ketidakpastian peraturan/birokrasi dan sistem perpajakan.

Dengan semakin derasnya arus Revolusi Industri 4.0, pemuda Indonesia perlu lebih adaptif dan jeli dalam mengidentifikasi peluang untuk berkembang. Misalnya dengan melek teknologi dan meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan kreativitas di bidang-bidang yang akan makin diperlukan ke depannya. Teknologi *startup* semakin mendapat tempat di dunia bisnis Indonesia maupun di dunia



Duta Besar Ibnu Hadi mendengarkan penjelasan Mr. Mai Phuoc Dung, Director of the Protocol Department, MoFA Vietnam saat Advanced Visit the 36th ASEAN Summit, 5 Maret 2020 (Sumber foto: Dok. Pribadi)

dan perkembangan digital ekonomi di kawasan menawarkan banyak peluang dan kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk semakin maju dan berkembang. Dalam semangat keketuaan Vietnam, apakah yang dapat diusahakan untuk meningkatkan pertukaran investasi di kedua belah negara?

Keketuaan Vietnam di ASEAN diwarnai dengan beberapa optimisme. Negara tersebut telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara dengan pertumbuhan GDP sebesar 7 persen.

Berdasarkan data Google & Temasek/Bain, *e-conomy* SEA 2019, nilai total ekonomi digital 6 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) tahun 2019 sebesar US\$100 milyar. Angka tersebut diproyeksikan akan tumbuh hingga US\$300 milyar tahun 2025. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh pengembangan *e-commerce*, *ride-*

hailing, dan *game online*. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara telah menghasilkan beberapa teknologi *unicorn* yang paling sukses, antara lain Gojek, Grab, Lazada, Traveloka, Tokopedia, Razer, SEA Group, dan VNG, yang berhasil menarik jutaan investasi ke kawasan. Pada saat yang sama, *e-commerce* telah membuka akses pasar bagi banyak UMKM.

Selain itu, integrasi ekonomi digital yang lebih luas juga berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan GDP di kawasan. Dalam kaitan ini, ASEAN telah berupaya untuk menghasilkan dan mendukung berbagai perjanjian terkait *e-commerce*, integrasi digital, dan perlindungan data dalam dua tahun terakhir. Perkembangan ini membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas untuk dapat memaksimalkan manfaat penuh dari ekonomi digital sekarang ini.

“Keketuaan Vietnam di ASEAN diwarnai dengan beberapa optimisme. Negara tersebut menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat”

Dalam konteks bilateral, meski secara umum Vietnam masih berada di bawah posisi Indonesia dalam pengembangan ekonomi digital, Politbiro Partai Komunis Vietnam telah mengeluarkan Resolusi 52-NQ/TW tertanggal 27 September 2019 yang merinci panduan dan kebijakan untuk memastikan partisipasi aktif Vietnam pada industri 4.0. Sebagai informasi, tahun 2019, Vietnam menduduki peringkat ke-42 dalam Global Innovation Index 2019, naik 3 peringkat dari 2018; sedangkan Indonesia masih bertahan di posisi ke-85. Selain itu, perusahaan modal ventura Singapura, Cento Ventures, mencatat peningkatan jumlah investasi teknologi startup di Vietnam pada 2019 yang mencapai US\$741 juta dibandingkan jumlah investasi di Singapura yang berjumlah US\$693 juta dan di Thailand sebesar US\$135 juta.

Dengan demikian, kerja sama bilateral Indonesia dan Vietnam di bidang teknologi start-up perlu lebih ditingkatkan mengingat banyaknya ruang kerja sama yang dapat dikembangkan kedua negara. Dialog maupun *sharing session* di antara perusahaan / teknologi *start-ups* kedua negara diharapkan dapat mengarah kepada kerja sama bisnis dan investasi yang konkret serta mendorong pengembangan inovasi digital di kedua negara. ■



Sumber foto: www.asean2019.go.th

APLIKASI KEANGGOTAAN TIMOR-LESTE DI ASEAN

Rizky Anugerah Putera, Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN

Pada 2020 ini ASEAN melanjutkan pembahasan aplikasi Timor-Leste untuk keanggotaan ASEAN. Terakhir, pada 18 September 2019, perwakilan sepuluh negara anggota ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG) telah membahas agenda dimaksud.

Keputusan mengenai keanggotaan adalah hal mendasar bagi ASEAN. Untuk itu, mekanisme pertemuan ACCWG ini secara

khusus dibentuk untuk membahas aplikasi Timor-Leste ke ASEAN. Pertemuan ini bersifat *open-ended*, yaitu dapat diselenggarakan dalam beberapa putaran, dan *cross-pillar* atau melibatkan ketiga pilar Masyarakat ASEAN (Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya).

Seluruh negara anggota ASEAN mengharapkan kehadiran komite dari ketiga pilar Masyarakat ASEAN dapat membahas secara menyeluruh berbagai indikator kesiapan Timor-Leste untuk bergabung de-

ngan ASEAN maupun sebaliknya, kesiapan ASEAN menyambut Timor-Leste. Adapun agenda resmi 8th ACCWG on Timor-Leste's ASEAN Membership Application membahas kelanjutan aplikasi partisipasi Timor-Leste di kegiatan ASEAN, yang ditujukan untuk membangun kapasitas serta *progress report* dari hasil pertemuan ACCWG sebelumnya.

Sebelumnya, pada pertemuan ke-6 ACCWG 2019 telah disepakati setiap pilar Masyarakat ASEAN perlu membentuk tim pencari fakta atau Fact-Finding Mission (FFM). Tim



Sumber foto: www.asean2019.go.th

Khusus untuk Pilar Ekonomi, kegiatan FFM direncanakan akan melibatkan tim dari Asian Development Bank (ADB).

ini kemudian akan meninjau langsung ke lapangan untuk menilai kesiapan Timor-Leste menurut kriteria kesiapan yang ditentukan masing-masing pilar. Hingga saat ini, baru Tim FFM dari Pilar Masyarakat Politik-Kemanan ASEAN yang telah berkunjung ke Dili pada 3-6 September 2019. Hasil kunjungan dituangkan dalam laporan yang memuat komponen penilaian mencakup komitmen Timor-Leste bergabung dengan ASEAN, serta politik luar negeri Timor-Leste yang sejalan dengan ASEAN dan senantiasa mendukung posisi ASEAN.

Adapun tim pencari fakta dari Pilar Masyarakat Ekonomi dan Pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN merencanakan kunjung-



Delegasi Indonesia pada 8th ACCWG on Timor-Leste's ASEAN Membership Application (Sumber foto: www.asean2019.go.th)

an ke Timor-Leste pada tahun ini. Khusus untuk Pilar Ekonomi, kegiatan FFM direncanakan akan melibatkan tim dari Asian Development Bank (ADB). Pertemuan ke-8 ACCWG on Timor Leste pun menekankan kembali pentingnya Senior Economic Officials Meeting (SEOM) dan ASEAN Socio-Cultural Community (SOCA) selaku pemangku kepentingan di Pilar Ekonomi dan Sosi-

al-Budaya untuk segera melaksanakan FFM, agar proses aplikasi Timor-Leste juga dapat segera diselesaikan. Aplikasi keanggotaan Timor-Leste di ASEAN selanjutnya akan dibahas di Da Nang, Vietnam pada 5 Maret 2020. ■



Sumber foto: Kementerian Luar Negeri RI

DIPLMACY FOR PEACE AND PROSPERITY: HIGHLIGHTS ON THE ANNUAL PRESS STATEMENT OF THE MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

Sabrina, Directorate of Information and Media

"Diplomacy for Peace and Prosperity" with the hashtags #Diplomacy4PeaceAndProsperity and #Diplomacy4U, was the theme of the Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs to emphasize the achievements of Indonesian Diplomacy. The event was held on January 8, 2020 at the Ministry of Foreign Affairs building in Jakarta.



Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyerahkan penghargaan ke pemenang Adam Malik Awards (Sumber foto: Kementerian Luar Negeri RI)

The Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs in bahasa (Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri) refer to as #PPTM, is to highlight information on the achievements and priorities of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA).

The attendees of this event were Diplomatic Corps, Academics, International Organizations, Mass Media and other Stakeholders. The event was divided into segments: Adam Malik Award and Social Media Award awarding, and the Annual Press Statement by Foreign Minister.

ADAM MALIK AWARD

The Ministry of Foreign Affairs continues its tradition to honor the media and journalists for their contributions in actively playing a part in disseminating information about Indonesia's foreign policy to the public in a factual, accurate, accountable and balanced manner. Adam Malik Awards are given to those who deserve the acknowledgement. This year, Adam Malik Award went to:

- Republika as Best Printed Media.
- Antara as Best Online Media.
- Kompas TV as Best TV Media.
- RRI Pro 3 RRI as the Best Radio Media.
- Dian Septiari from The Jakarta Post as the Best Print Media Journalist

- Rina Ayu Panca Rini from Tribunnews as the Best Online Media Journalist.

SOCIAL MEDIA AWARD

For the first time, Social Media Award was given in this annual event. This awarding is a kind of appreciation to Indonesian missions and ambassadors abroad. They were who actively utilized social media for the implementation of diplomacy and dissemination of information through their official platforms during 2019 got the appreciation.

The Social Media Award of 2019 were given to:

- The Indonesian Embassy in Hanoi, Vietnam as The Most Active Mission for Representatives who use social media well.
- The Indonesian Consulate General in Chicago as The appreciation of the Most Engaging Mission active in two-way communication with audiences.
- The Indonesian Consulate General in Hong Kong as The appreciation of The Best Use of Visual for Representatives who are considered effective in the use of audio and visuals.
- Ambassador of Ottawa, Abdul Kadir Jailani as The appreciation of The Digital Head of Mission intended for the Chief Representative who has utilized

his social media effectively for the advancement of diplomacy.

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS ANNUAL PRESS STATEMENT

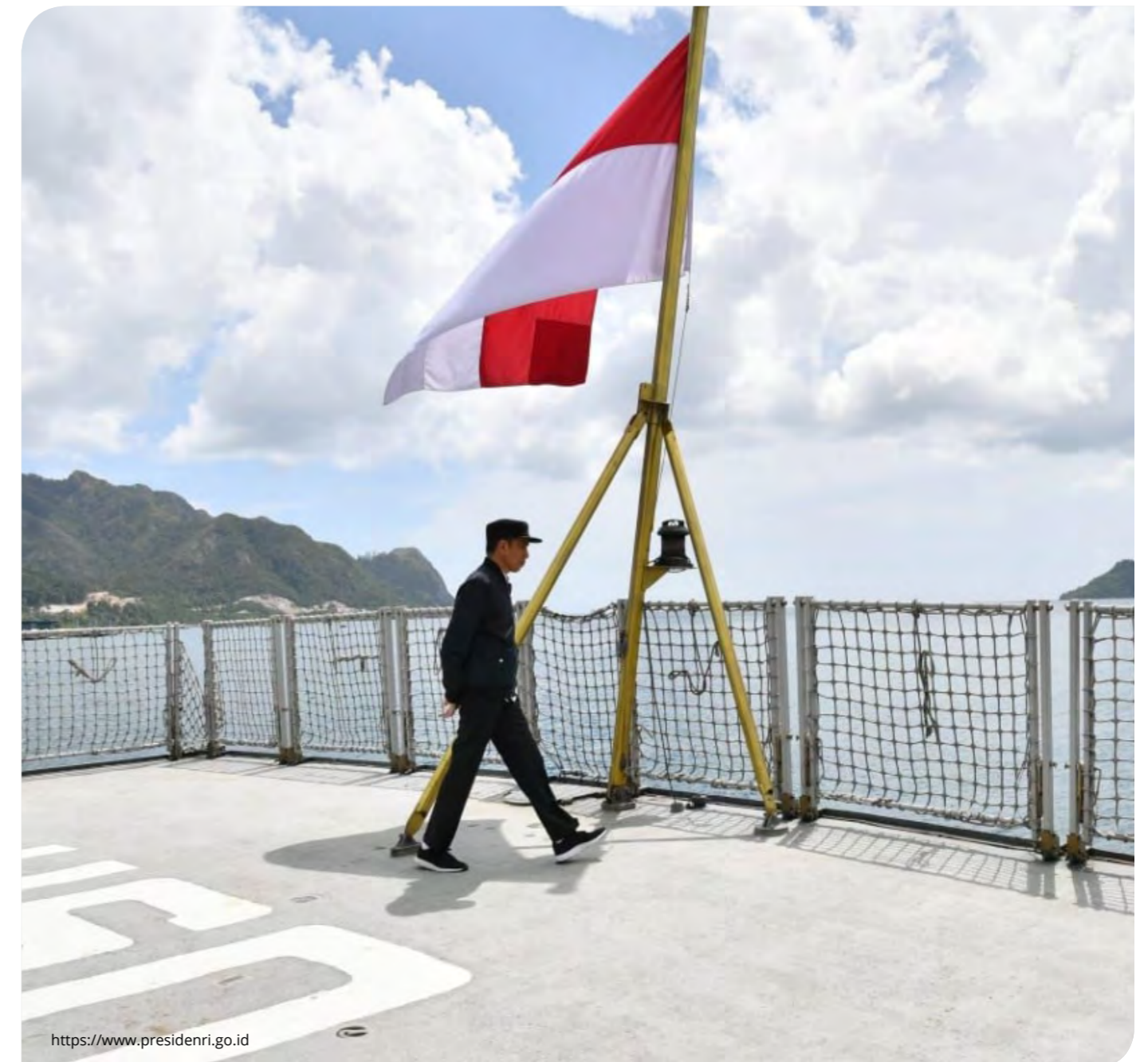
In her speech, Foreign Affairs Minister Retno Marsudi underlined the need of a collaborative strategic outlook that will be the game changer in the current world situation. "And it will boost higher world economic growth," she said.

She also said that the Ministry of Foreign Affairs is consistent in strengthening economic diplomacy by establishing co-operations based on the principle of mutual benefit, fairness and not a zero-sum game. Along with that, Indonesia continues to commit to contributing to humanity.

At last, the Minister also said that the Ministry will continue 4 + 1 priorities programs, namely strengthening economic diplomacy, protection diplomacy, sovereignty and national identity diplomacy, Indonesia's leadership in the regional and global stage, plus strengthening Indonesia's diplomatic infrastructure. ■

URGENSI PERBAIKAN SISTEM KEAMANAN MARITIM DI INDONESIA

Muhammad Rafi Darajati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura



<https://www.presidenri.go.id>

Pada awal 2020 ini, salah satu bagian laut di Indonesia kembali mencuri perhatian. Indonesia kembali bersengketa dengan Tiongkok yang melakukan tindakan agresif di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna. Sengketa ini menjadi ancaman bagi pertahanan Indonesia karena lokasi yang diperebutkan berada di dekat perbatasan Indonesia. Tindakan Tiongkok ini dapat dikatakan merupakan dampak dari sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang belum selesai.

Saat ini keamanan maritim di Indonesia masih lemah karena tingginya tingkat pelanggaran di laut, misalnya karena penangkapan ikan secara ilegal. Pelanggaran yang masih sering terjadi di wilayah perairan Indonesia membuat harapan Indonesia untuk menjadi negara maritim akan sulit tercapai. Padahal, sebagai negara kepulauan, laut mempunyai makna penting bagi bangsa Indonesia yakni dari sisi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan ekonomi.

Sistem keamanan maritim merupakan hal yang penting untuk mencapai stabilitas nasional. Sistem keamanan maritim pada

dasarnya adalah segala aktivitas unsur patroli laut untuk memastikan keamanan wilayah laut Indonesia dan memastikan sumber daya laut Indonesia dapat untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai status negara maritim, keamanan maritim menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kedaulatan maritim. Keamanan maritim dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas dan wibawa Indonesia untuk menjadi negara maritim. Salah satu indikator negara berdaulat adalah kemampuan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan wilayah hulunya, serta mampu memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan bertumpu pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemampuan menjaga wilayah laut Indonesia dari penangkapan ikan secara ilegal akan berdampak positif terhadap wibawa Indonesia sebagai negara maritim di dalam menjaga kedaulatannya. Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu upaya penyelamatan sumber daya ikan di laut.

Optimalisasi pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, khusus-

nya di Laut Natuna, tidak terlepas dari manajemen yang diberlakukan. Kondisi yang diharapkan adalah telah dilakukan kajian secara mendalam dan matang sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Untuk itu, dalam pengelolaan keamanan maritimnya, Indonesia perlu memiliki sebuah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyeluruh dan komprehensif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah laut Indonesia.

Dalam mewujudkan keamanan maritim yang diharapkan, perlu dibangun sebuah lembaga yang responsif dan efektif sehingga dapat menjamin komando dan pengendalian serta terjaganya kesatuan fungsi dan tujuan lembaga. Pembentukan sebuah badan tunggal yang diberi kewenangan penuh melakukan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yang legalitasnya diakui oleh hukum nasional dan internasional mutlak dilakukan, di samping keberadaan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan di wilayah laut Indonesia. Lembaga tersebut diharapkan efektif dan efisien. Efektif be-



rarti mampu menjamin keamanan di laut Indonesia, khususnya di kawasan-kawasan tertentu yang menjadi pusat jalur-jalur perdagangan nasional dan internasional, serta wilayah laut yang mempunyai sumber daya alam yang potensial seperti di Laut Natuna. Adapun efisien berarti hasil penegakan hukumnya jauh lebih besar atau minimal sebanding dengan alokasi anggaran dari pemerintah.

Kehadiran lembaga khusus seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang mempunyai kewenangan penuh mengamankan maritim Indonesia harus independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada masa damai, status tersebut di dalam operasionalnya mampu bersinergi dengan TNI AL untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah laut Indonesia serta mendukung pembangunan, sekaligus

sebagai wadah dalam pembinaan kekuatan pengganda bagi TNI AL. Pada masa perang, ia menjadi komponen cadangan yang andal dalam mendukung pertahanan negara di laut.

Status atau eksistensi dari Bakamla tersebut mendesak direalisasikan. Selain untuk memenuhi tuntutan dunia internasional, juga memenuhi tuntutan nasional yang menghendaki pengamanan dan penegakan hukum laut efektif dan efisien. Untuk itu, Bakamla harus diberi wewenang menyidik semua tindak kejahatan. Bakamla harus dapat mengakomodasi seluruh kekuatan dan kemampuan instansi/lembaga terkait lainnya sehingga tercipta single agency multi task (satu kesatuan komando dengan berbagai macam tugas). Kedudukan dan dasar hukum Bakamla tersebut harus disesuaikan dengan hukum nasional dan

hukum internasional. Independensi Bakamla merupakan dasar dalam membangun struktur organisasi Bakamla yang langsung berada di bawah garis komando Presiden, dengan fokus pada permasalahan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi nasional.

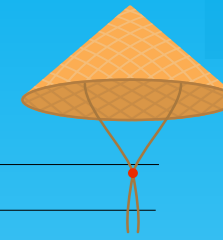
Penambahan kewenangan dari Bakamla tersebut tidak menghilangkan kewenangan instansi/lembaga terkait lainnya, tetapi justru akan meningkatkan kinerja instansi/lembaga tersebut karena lebih berfokus pada tugas intinya serta tidak perlu menggelar operasi keamanan. Dalam hal operasi keamanan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, unsur-unsur operasional akan berada di bawah komando dan kendali langsung dari Bakamla, sedangkan dalam hal penanganan perkara dapat diselesaikan secara langsung oleh Bakamla atau dapat diserahkan kepada masing-masing instansi/lembaga yang memiliki kewenangan. Selanjutnya, Bakamla dapat memonitor jalannya perkara yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan di pengadilan.

Dengan kepentingan Indonesia yang besar di laut, maka pihak-pihak yang berkepentingan harus saling berkoordinasi dan bersinergi, karena jika tidak, akan terjadi tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini tentunya akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap upaya penegakan hukum dan keamanan di laut. Apabila dilihat dari aspek kemanfaatan, penyelesaian masalah-masalah di laut, khususnya menyangkut tindakan Tiongkok di Laut Natuna, tidak saja bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga secara politik dan keamanan untuk Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, upaya ini juga dapat bermanfaat secara signifikan untuk penguatan sistem pertahanan dan keamanan regional, mengingat posisi geopolitik Laut Natuna yang strategis untuk negara-negara Asia Tenggara. ■

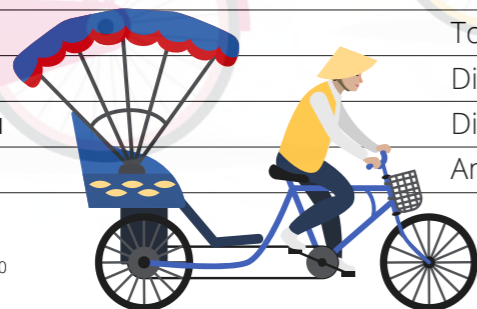
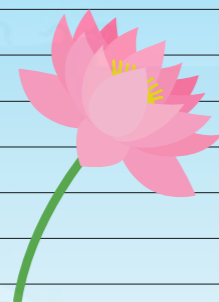


Sumber foto: Shutterstock

Pojok Bahasa BAHASA VIETNAM



NO.	VIETNAM	INDONESIA
1.	Xin chào	Halo
2.	Chào buổi sáng	Selamat pagi
3.	Chào buổi trưa	Selamat siang
4.	Chào buổi chiều	Selamat sore
5.	Chào buổi tối	Selamat malam
6.	Bạn khỏe không?	Apakah kabar Anda?
7.	Tôi khỏe	Saya baik
8.	Tôi không khỏe	Saya tidak sehat
9.	Chúc may mắn	Semoga berhasil
10.	Bạn sống ở đâu	Anda tinggal di mana?
11.	Bạn đến từ đâu	Anda berasal dari mana?
12.	Tôi đói bụng	Saya lapar
13.	Bạn có đói không	Apakah Anda lapar?
14.	Cảm ơn	Terima kasih
15.	Không có gì	Tidak masalah (sama-sama)
16.	Bạn tên gì	Siapa nama Anda?
17.	Xin lỗi	Maaf/permisi
18.	Có	Iya
19.	Không	Tidak
20.	Tôi biết	Saya tahu
21.	Tôi không biết	Saya tidak tahu
22.	Tôi hiểu	Saya mengerti
23.	Tôi không hiểu	Saya tidak mengerti
24.	Nhà vệ sinh ở đâu vậy	Toilet ada di mana?
25.	Xin hãy nói chậm thôi	Tolong bicara pelan-pelan
26.	Xin nói lại lần nữa	Tolong diulang
27.	Nhà ga ở đâu	Di mana stasiunnya?
28.	Trạm xe buýt ở đâu	Di mana stasiun bisnya?
29.	Bạn đi đâu đấy	Anda mau ke mana?



30.	Bạn đang làm gì đấy	Apa yang Anda kerjakan?
31.	Tôi có thể có số của bạn không	Bisakah saya minta nomor Anda?
32.	Rất vui được gặp bạn	Senang bertemu dengan Anda
33.	Tôi bị ốm	Saya sakit
34.	Cái này bao nhiêu	Berapa harga ini?
35.	Tôi không thích điều này	Saya tidak suka ini
36.	Tôi thấy nóng	Saya merasa panas
37.	Tôi thấy lạnh	Saya merasa dingin
38.	Tôi cảm thấy chóng mặt	Saya merasa pusing
39.	Tôi bị đau bụng	Saya sakit perut
40.	Tôi không muốn về nhà	Saya tidak ingin pulang
41.	Tôi bị mất ví rồi	Saya kehilangan dompet
42.	Tôi bị lạc	Saya tersesat
43.	Làm ơn giúp tôi	Tolong saya
44.	Tôi muốn ăn phở	Saya ingin makan phở (mi khas Vietnam)
45.	Tôi cần đến sân bay	Saya ingin pergi ke bandara
46.	Tôi no rồi	Saya kenyang
47.	Tôi không khát	Saya tidak haus
48.	Bạn thật vui tính	Kamu lucu sekali
49.	Xong rồi	Sudah selesai
50.	Không có gì	Tidak ada lagi (tidak masalah/sama-sama)
51.	Mấy giờ rồi	Jam berapa sekarang?
52.	Nhà tắm ở đâu	Di mana letak kamar mandi?
53.	Bạn có đề nghị gì	Apa saran Anda?
54.	Chúc mừng năm mới	Selamat tahun baru
55.	Tạm biệt	Selamat tinggal
56.	Hẹn gặp lại	Sampai jumpa
57.	Xin chúc mừng	Selamat
58.	Tôi đang đi nghỉ	Saya sedang berlibur
59.	Tôi đang trên đường đi làm	Saya sedang dalam perjalanan ke tempat kerja
60.	Tôi làm việc ở đây	Saya bekerja di sini
61.	Chỗ nào tốt để ăn tối	Di mana tempat makan yang bagus?
62.	Tôi có thể truy cập internet ở đâu	Di mana saya bisa mendapatkan akses internet?
63.	Khi nào bạn đi	Jam berapa Anda pergi?
64.	Tôi đến trễ	Saya terlambat
65.	Bạn có thể đưa tôi đến sân bay	Bisa antar saya ke bandara?



Bram Ardiwinata
Khatulistiwa Digital Valley



ÁO DÀI, BUSANA TRADISIONAL VIETNAM YANG ANGGUN

Janita Jaya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

Sumber foto: Shutterstock



Sumber foto: Shutterstock

Sebagai penghargaan atas Ketekunan Vietnam untuk ASEAN pada 2020, Majalah Masyarakat ASEAN edisi kali ini akan membahas fun facts mengenai Vietnam, di antaranya tentang busana daerah negeri ini. Apakah sahabat ASEAN pernah menyaksikan film *The White Silk Dress* (Áo lụa Hà Đông) yang dirilis pada 2006? Ini merupakan salah satu film Vietnam yang telah memenangkan banyak penghargaan, di mana pakaian áo dài mempunyai peran yang

signifikan dalam plot film ini. Film ini menekankan bahwa áo dài merupakan simbol dari kekuatan perempuan Vietnam, seperti yang tertuang pada voice over di akhir film tersebut,

"...My mother said a white silk dress is the symbol of a Vietnamese woman's immense suffering as well as her generosity. Through traumatic hardship, through horrific destruction caused by countless wars, the Vietnamese white silk dress still maintains beauty. The

beauty of a Vietnamese woman cannot be characterized by white skin, rosy cheeks, and red lips, but by the elegant laps of the white silk dress, which represents honesty, purity, and grace..."

Áo dài adalah salah satu busana daerah Vietnam yang terkenal. Busana ini seringkali menjadi pilihan untuk pakaian formal di acara-acara adat, seperti perayaan tahun baru Vietnam atau Tết dan pernikahan. Áo secara harfiah bermakna pakaian, sedangkan dài berarti panjang. Pakaian ini awalnya berasal dari áo ngũ thân yang merupakan pakaian yang umumnya dikenakan para aristokrat Vietnam di abad

Pakaian ini menjadi perlambang kecantikan wanita Vietnam dan tetap populer hingga kini.

ke-19. Pakaian ini kemudian dimodifikasi dengan gaya lebih modern di awal abad ke-20 oleh perancang busana lokal yang terinspirasi oleh mode Paris, seperti Nguyễn Cát Tường, sehingga menjadi busana áo dài yang dikenal saat ini. Busana tradisional, yang awalnya berbentuk tunik longgar ini, didesain ulang untuk lebih *well-fitted*, khususnya untuk áo dài model perempuan, sehingga menampilkan keindahan bentuk tubuh meski pemakainya mengenakan tunik panjang. Permaisuri terakhir Kerajaan Vietnam, Nam Phương dari Dinasti Nguyễn pada 1930an, dikenal sangat menggemari busana áo dài.

Busana áo dài pun mengalami perubahan model seiring dengan berjalannya waktu. Perancang busana memodifikasi potongan busana áo dài menjadi lebih kontemporer dengan mengadaptasi mode Barat, seperti meninggikan potongan kain samping áo dài sehingga memperlihatkan sedikit pinggang,



Sumber foto: APEC.org



Sumber foto: Shutterstock



Sumber foto: Shutterstock

potongan lengan baju bermodel *raglan sleeves*, serta bermacam warna dan motif. Busana áo dài umumnya terbuat dari kain sutra atau kain berbahan lembut lainnya, sehingga lambaian kain áo dài yang panjang terlihat halus dan elegan ketika dikenakan.

Busana áo dài versi untuk laki-laki disebut áo gấm, bentuknya tunik berbahan brokat yang hampir serupa dengan áo dài, serta memiliki ragam motif berwarna-warni. Busana áo gấm pernah dipamerkan dalam APEC Summit pada 2006, di mana busana ini dikenakan oleh para pemimpin dunia pada saat pengambilan foto resmi APEC Economic Leaders' Meeting.

Pakaian ini menjadi perlambang kecantikan wanita Vietnam dan tetap populer hingga kini. Áo dài juga menjadi pakaian yang umum dikenakan sehari-hari, seperti seragam sekolah, seragam awak kabin pesawat, serta pegawai bidang jasa dan perhotelan di Vietnam. Kepopuleran busana áo dài di Vietnam dapat dilihat juga tak hanya dalam perayaan maupun bisnis, namun juga dalam budaya pop Vietnam seperti dalam film-film serta mode dan fesyen seperti dalam penyelenggaraan kontes kecantikan Miss Áo Dài. ■



Sumber foto: Shutterstock



Sumber foto: Shutterstock



Sumber foto: Shutterstock



Sumber foto: Shutterstock



Sumber foto: Shutterstock

PESONA PARIWISATA BRUNEI DARUSSALAM

Annisa Khairati, Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Sarah Nurkholifah, Peserta Magang Periode Maret-April 2020 Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN



Sumber foto: Shutterstock

Apakah yang terlintas dalam pikiran Anda ketika menyebutkan Brunei Darussalam? Sebuah negara kecil namun makmur di utara Pulau Kalimantan, dikelilingi oleh hutan tropis, dan kaya akan ladang minyak dan gas alam. Negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut ini dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam secara resmi bergabung dengan ASEAN sekaligus menjadi anggota ke-6 organisasi ini pada 7 Januari 1984. Selain ASEAN, Brunei Darussalam cukup aktif berperan dalam dunia politik sebagaimana perannya menjadi ketua forum Kerja Sama Ekonomi

Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) pada 2000, menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Organization of Islamic Cooperation/OIC), Persatuan Negara-Negara Persemakmuran, dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Di sektor pariwisata, Brunei Darussalam tak kalah dari negara tetangganya. Negara ini memiliki sejumlah destinasi wisata yang memikat para wisatawan lokal dan mancanegara datang berkunjung. Sejak 2015, pemerintah Brunei Darussalam mulai menetapkan pariwisata sebagai prioritas pembangunan nasionalnya dengan tujuan

meningkatkan angka kedatangan wisatawan yang akan memengaruhi aktivitas ekonomi bidang pariwisata, termasuk kualitas dan diversitas produk wisata di Brunei Darussalam. Kementerian Sumber Daya Utama dan Pariwisata Brunei Darussalam didaulat melakukan perencanaan dan pengembangan potensi destinasi melalui Brunei Tourism Master Plan dengan memasukkan beragam pilihan produk wisata, di antaranya *adventure tourism*, *ecotourism*, dan *Islamic tourism*.



MASJID JAME' ASR HASSANIL BOLKIAH

Masjid yang didirikan oleh orang nomor satu Brunei Darussalam ini terletak di Bandar Seri Begawan, dibuat untuk memperingati 25 tahun ber-tahtanya Sultan Haji Hassanil Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah. Masjid ini juga dikenal dengan nama Kiarong, karena terletak di daerah Kiarong. Masjid seluas 20 hektare ini dapat menampung tak kurang dari 5.000 orang.

Sumber foto: Wikipedia

YAYASAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH

Yayasan Shopping Complex adalah salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Brunei Darussalam yang dibuka pada 1996. Pusat bisnis ini dianggap sebagai objek wisata bagi sebagian orang karena menyajikan berbagai produk buatan lokal dan internasional. Baru-baru ini, pusat perbelanjaan ini mengalami beberapa perubahan dan sejak dibuka kembali tempat populer ini baru menampilkan produk lokal.



Sumber foto: bruneitourism.com

MASJID OMAR ALI SAIFUDDIN

Masjid Omar Ali Saifuddin adalah simbol kejayaan Islam di Brunei sekaligus tengara mengagumkan di Asia-Pasifik yang memperlihatkan pemandangan kota Bandar Seri Begawan. Pembangunan masjid yang memiliki daya pikat bagi wisatawan domestik dan mancanegara ini diprakarsai oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddien. Masjid ini menyajikan konsep bangunan Islam modern dengan perpaduan antara Mughal dan Italia.



Sumber foto: Flickr.com



Sumber foto: willflyforfood.net

AMBUYAT

Ambuyat adalah hidangan nasional Brunei Darussalam yang terbuat dari batang pohon palem rumbia. Makanan ini telah menjadi ikon di Brunei Darussalam, disukai oleh masyarakat negara itu dari segala usia dan kalangan serta digunakan untuk mempromosikan industri pariwisata. Makanan yang terkenal lezat ini disajikan dengan berbagai macam kuah, saus, dan lauk.



KAMPONG AYER

Dijuluki sebagai Venesia dari Timur, Kampung Ayer dibangun dengan nuansa rumah panggung yang berdiri di atas air. Warga desa terapung ini terkenal ramah. Untuk menjangkau kampung ini, pengunjung harus menyeberangi sungai dengan perahu. Tarifnya BND 1 atau sekitar Rp 10.354 per orang.

Sumber foto: Kumparan.com

SUMBILING ECO VILLAGE

Desa Ramah Lingkungan Sumbiling memanfaatkan upaya pelestarian jangka panjang dan telah menjadi salah satu destinasi ekowisata utama Brunei Darussalam. Sumbiling dikelola bersama dengan masyarakat Iban setempat, yang terletak di tepi Sungai Temburong. Setiap pengunjung yang datang berkesempatan menjelajahi hutan hijau yang subur dan akan mendapatkan liburan terbaik.



Sumber foto: seasia.co



Sumber foto: viator.com

ULU TEMBURONG NATIONAL PARK

Dikutip dari situs pariwisata Brunei Darussalam, Taman Nasional Ulu Temburong adalah rumah bagi pohon cemara yang hidup berabad-abad tahun lamanya. Faktanya, 80 persen wilayah Brunei Darussalam adalah hutan hujan tropis dan rumah bagi berbagai satwa liar. Terdapat pula The Canopy Walkway yang menjulang setinggi 60 meter dengan pesona alam yang menakutkan. Untuk mengamati indahnya ekosistem Temburong, pengunjung disarankan datang saat cuaca cerah. Selama di Temburong, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas, dari *rafting*, *camping*, hingga *jungle walk*.



Sumber foto: atlasobscura.com

ONE BILLIONTH BARREL MONUMENT

One Billionth Barrel Monument diresmikan pada 1991 sebagai simbol pencapaian satu miliar barel minyak Brunei Darussalam. Sebuah ikon dengan lambang nasional ini berdiri kokoh di sepanjang pantai di Seria, yang bermakna kemakmuran bangsa. Tempat ini menawarkan pemandangan matahari terbenam dengan kilang minyaknya.

Berdasarkan data dari Kementerian Sumber Daya Utama dan Pariwisata Brunei Darussalam, lonjakan tertinggi terjadi pada 2016-2018. Kenaikan wisatawan Brunei Darussalam mencapai 7,4 persen menjadi 278.136 pengunjung jalur udara pada 2018. Jumlah itu melampaui kunjungan wisatawan tahun sebelumnya yakni 258.955 dan 218.809 pengunjung pada 2016. ■



Jumlah Wisatawan
BRUNEI DARUSSALAM

Target 2020
450.000
wisatawan

Sumber: Kementerian Sumber Daya Utama dan Pariwisata Brunei Darussalam



MENIKMATI KAWASAN SAIGON DI HO CHI MINH CITY

Ahmad Fahriza, Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN



Sumber foto: Dok. Pribadi

Saigon, yang kini bernama Ho Chi Minh City, dikenal sebagai kawasan wisata dengan sentuhan Eropa di Vietnam.

Setelah berakhirnya perang Vietnam dan penyatuan kembali Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Saigon melebur dengan kawasan sekitarnya dan berganti nama menjadi Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City diambil dari nama Presiden Republik Demokratik Vietnam (1945 - 1969) yang juga merupakan tokoh proklamasi kemerdekaan Vietnam, Ho Chi Minh.

Mengunjungi kawasan Saigon, khususnya di kawasan Distrik 1 Ho Chi Minh City, kita akan disugahi kemegahan arsitektur kolonial khas Eropa. Salah satunya adalah Gedung bernama "People's Committee Building of Ho Chi Minh City". Gedung yang dulunya

bernama Hotell de Ville ini, dibangun pada awal tahun 1900-an. Desainnya dibuat oleh seorang arsitek Prancis bernama Femand Gardes. Kini, gedung tersebut berfungsi sebagai gedung pemerintahan sehingga sulit bagi pengunjung umum masuk melihat isi gedung.

Berjalan sedikit dari gedung tersebut, kita akan menemui taman yang membentang panjang dan dikelilingi pusat perbelanjaan, hotel, perkantoran dan restoran-restoran dengan arsitektur yang sangat indah. Tepat berada di ujung taman, kita akan disambut oleh patung Ho Chi Minh yang berdiri gagah dan memberi salam kepada para pengunjung. Taman yang dikenal dengan



Sumber foto: Dok. Pribadi



Sumber foto: Dok. Pribadi

kawasan Ho Chi Minh Square tersebut dipenuhi oleh masyarakat dan wisatawan, khususnya pada malam hari sebagai tempat berkumpul dan menikmati keindahan kawasan Saigon.

Lelah berjalan kaki dan ingin menikmati pertunjukkan seni? Kunjungilah Ho Chi Minh Opera House (Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh) yang terletak sekitar 300 meter dari Ho Chi Minh Square. Gedung elegan berarsitektur kolonial tersebut dibangun pada 897 oleh arsitek bernama Eugene Ferret. Dengan kapasitas 500 tempat duduk, tempat ini sering menampilkan berbagai kesenian khas Vietnam seperti sirkus bambu, atraksi akrobatik, tarian, serta drama

yang biasanya diiringi oleh musik tradisional. Pertunjukan tersebut biasanya menggambarkan tentang keindahan budaya di Vietnam baik di kota maupun desa. Pertunjukan ini biasanya berlangsung mulai pukul 6 sore waktu setempat dan penjualan tiket dimulai mulai pukul 11 siang.

Jika perut mulai terasa lapar setelah menikmati tempat-tempat tersebut, terdapat lokasi makan yang layak dikunjungi para wisatawan. Cukup berjalan kaki sekitar 10 menit, kita akan menemui kawasan bernama Ben Thanh Street Food Market. Tidak hanya menyajikan makanan khas Vietnam, di kawasan ini kita juga dapat menikmati kuliner khas Eropa, Jepang, Korea hingga makanan

halal yang disajikan oleh restoran Malaysia di sekitar kawasan tersebut. Pastinya wisatawan wajib mencoba pho yang merupakan makanan paling terkenal di Vietnam.

Jika ingin mencoba pengalaman makan malam yang lebih spesial, tidak ada salahnya mengunjungi Bach Dang Harbor Garden. Selain menjadi salah satu terminal transportasi air di Ho Chi Minh City, tempat ini juga menyajikan lokasi yang indah untuk makan malam sembari menikmati kilauan lampu kota di pinggir Sungai Saigon. Bahkan, jika memiliki anggaran lebih, kita dapat menikmati makan malam mewah yang romantis di atas kapal pesiar.

Puas menikmati keindahan Saigon, jangan lupa mengunjungi Ben Thanh Market (Chợ Bến Thành) yang merupakan salah satu tujuan favorit bagi wisatawan untuk berbelanja. Pasar yang berada sekitar 500 meter dari Ho Chi Minh Square ini menjual beragam barang mulai dari pakaian, makanan, minuman hingga oleh-oleh khas Vietnam. Siapkan pula jurus andalan untuk menawar barang karena semua barang khususnya oleh-oleh di sini ditawarkan dengan harga yang masih bisa ditawar.

Mengakhiri perjalanan di kawasan Saigon, tidak lengkap jika tidak mencoba kopi khas Vietnam. Kopi Vietnam memiliki ciri khas proses penyaringan ekstrak kopi yang tradisional dicampur dengan susu kental manis dan disajikan dengan segelas es batu. Terdapat banyak kafe lokal yang menyajikan minuman ini. Cukup dengan merogoh kocek mulai dari 20 ribu dong (sekitar 13 ribu rupiah), kamu bisa menikmati kopi ini untuk melengkapi perjalanan wisata di kawasan Saigon.

SELAIN TEMPAT-TEMPAT DI ATAS, BEBERAPA REKOMENDASI TEMPAT YANG JUGA LAYAK DIKUNJUNGI ANTARA LAIN:

Istana Kemerdekaan (Dinh Độc Lập)

Istana ini merupakan lokasi bersejarah berakhirnya perang Vietnam ketika tank-tank Vietnam Utara merusak gerbang utama istana tersebut di pagi hari 30 April 1975. Hingga saat ini, kondisi tempat ini masih sama seperti keadaan pada 1975. Tempat ini buka setiap mulai pukul 8.30 pagi hingga 4 sore. Untuk setiap kunjungan, wisatawan perlu membayar sekitar VND 40.000.



Sumber foto: Shutterstock

Kantor Pos Pusat Saigon (Bưu điện Trung tâm Sài Gòn)

Gedung ini dibangun pada 1896 dan sampai sekarang masih berfungsi sebagai kantor pos. Lokasinya terletak sekitar 500 meter dari Ho Chi Minh Square. Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam.

Notre Dame Cathedral of Saigon (Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn)

Gereja katolik ini dibangun pada 1880an oleh kolonial prancis yang menduduki kawasan tersebut pada masanya. Pada 1962, Vatikan secara resmi memberikan status basilika pada katedral tersebut. Tempat ini berlokasi persis di sebelah Kantor Pos Saigon dan buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore.



Sumber foto: Shutterstock

Museum Peninggalan Perang (Bảo tàng chứng tích chiến tranh)

Museum ini berlokasi di Ward 6, Distrik 3, Ho Chi Minh City, atau sekitar 1,4 KM dari Ho Chi Minh Square. Di sini kita dapat menemukan sisa-sisa peralatan tempur militer dari perang Vietnam dan Perang Indochina pertama. Pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari VND 15.000 untuk masuk ke Museum. Museum ini buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 6 sore. ■



Sumber foto: Shutterstock



Media dan jurnalis yang memenangkan Adam Malik Awards 2020 bersama Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi



Sambutan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2020



Social Media Awards 2020 yang dimenangkan oleh KBRI Hanoi, KJRI Chicago, KJRI Hong Kong, dan Duta Besar RI untuk Kanada Abdul Kadir Jailani.



Nominasi Adam Malik Awards untuk kategori jurnalis media online terbaik.

4 KUNCI MENINGKATKAN DAYA SAING

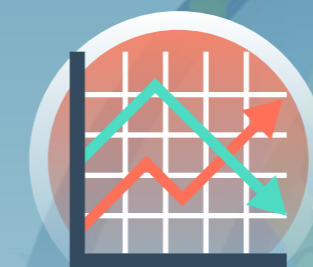
Indeks daya saing Indonesia berada di peringkat 50 dari 141 negara di dunia



Perkembangan
IPTEK



Tingkat
Inflasi



Pertumbuhan
Ekonomi



Pembangunan
Infrastruktur

Peringkat Indonesia turun 5 peringkat pada tahun 2019 menjadi 50 dari semula di urutan 45 tahun pada tahun 2018.

Source: Global Competiveness Index (GCI) 2019

MAJALAH MASYARAKAT ASEAN *GOES DIGITAL*

Majalah Masyarakat
ASEAN Hadir Dalam
Format Digital yang
Dapat Diakses Melalui:

SITUS KEMENTERIAN

www.kemlu.go.id

- Ketik “Majalah Masyarakat ASEAN” pada kolom “cari atau search”.
- Klik edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin anda baca.

MEDIA SOSIAL



@asean_ri



AyokenaliASEAN
ASEAN Indonesia

SITUS SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN-INDONESIA

<http://setnas-asean.id/>

- Cari menu “referensi” dan pilih “Majalah Masyarakat ASEAN”.
- Klik edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin anda baca.



Ditjen Kerjasama ASEAN